



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 mengamanatkan bahwa RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani serta dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Badan-badan, Dinas-dinas dan Kantor-kantor.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah Kabupaten Barito Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
 - b. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 adalah :
- a. sebagai acuan bagi seluruh OPD di Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2021;
 - b. sebagai dasar bagi OPD untuk memfinalkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun Anggaran 2021;
 - c. sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Barito Timur dengan Bupati Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021;

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Program Strategis Nasional ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 ini dapat ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah.

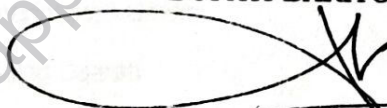
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal **14 Juli** 2020

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPÉRA A. Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal **14 Juli** 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,


PANAHAN MOETAR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.4
1.3 Hubungan antar Dokumen	I.7
1.4 Maksud dan Tujuan	I.8
1.5 Sistematika Dokumen RKPd	I.9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II.2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.9
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II.15
2.1.3.1 Pendidikan	II.15
2.1.3.2 Keagamaan	II.17
2.1.3.3 Tingkat Pengangguran	II.17
2.1.3.4 Prasarana dan Sarana Energi Listrik	II.18
2.1.3.5 Prasarana dan Sarana Air Bersih	II.19
2.1.3.6 Prasarana dan Sarana Pos dan Telekomunikasi	II.19
2.1.3.7 Pemerintahan Umum	II.19
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.21
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPd sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD	II.23
2.3 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Barito Timur	II.83
2.3.1 Permasalahan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah	II.84
2.3.1.1 Masalah pengembangan Perekonomian Daerah	II.85
2.3.1.2 Masalah Infrastruktur Dasar	II.88
2.3.1.3 Masalah Sumber Daya Manusia	II.90

2.3.1.4	Masalah Keragaman Budaya	II.91
2.3.1.5	Masalah Birokrasi	II.92
2.3.2	Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah	II.94
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.2
3.1.1	Arah Kebijakan Nasional	III.7
3.1.2	Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah	III.7
3.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III.8
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III.9
3.2.1.1	Prakiraan Target Pendapatan Daerah Tahun 2021	III.10
3.2.1.2	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021	III.12
3.2.1.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021	III.15
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.1
4.1	Tujuan dan sasaran Pembangunan	IV.4
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV.11
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional	IV.11
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	IV.12
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur	IV.13
4.3	Inovasi Daerah	IV.17
4.4	Program dan Kegiatan yang Mendukung Program Provinsi dan Program Nasional	IV.17
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V.1
5.1	Rencana Program Untuk Mencapai Prioritas Dan Sasaran Pembangunan	V.2
5.2	Rencana Program Dan Kegiatan Seluruh Penyelenggaraan Bidang Urusan	V.14
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI.1
6.1	Indikator Kinerja Daerah	VI.2
6.2	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	VI.45
BAB VII	PENUTUP	VII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis pada *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan

pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Kebijakan yang akan diambil pada periode ini menjadi salah satu simbol keberhasilan perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2018-2023, karena dokumen RKPD Tahun 2021 merupakan tahun ke tiga RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, sudah selayaknya perencanaan Tahun 2021 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan sebagai dasar kebijakan penentuan program prioritas .

Pengkajian hasil pembangunan periode sebelumnya sangat menentukan ketepatan dasar-dasar kebijakan pembangunan daerah antara periode sebelumnya dengan periode setelahnya. Hal tersebut menjadi penting sebagai kerangka penyeimbang rangkaian utuh pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran prioritas pembangunan, sehingga optimalisasi pembangunan daerah sulit tercapai. Oleh karena itu dengan memahami kondisi Kabupaten Barito Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih diterus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan terutama dalam penyusunan dokumen rencana tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SOPD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Bahwa berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 115); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 115);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 9) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023.

1.3. Hubungan antar Dokumen

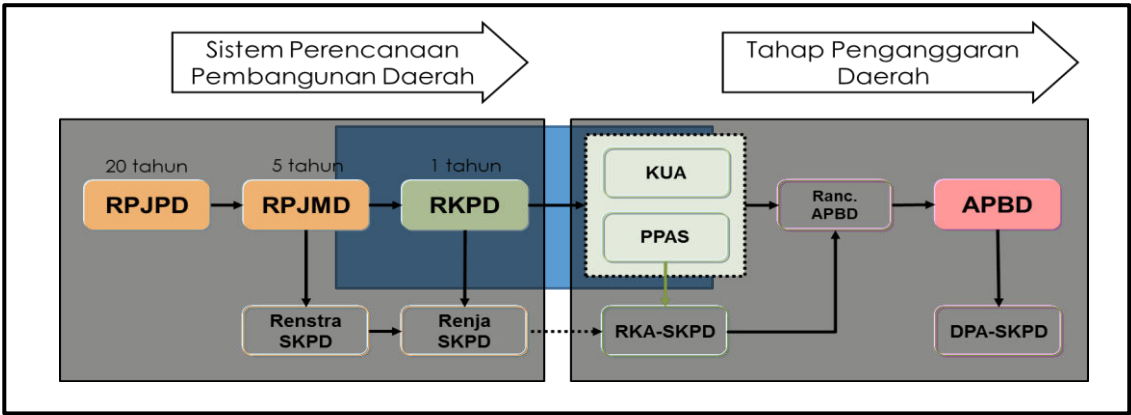
Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur khususnya bagi SOPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SOPD.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SOPD, RKPD, dan Renja SOPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan

kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Gambar I.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Dari gambar 1.1. di atas, tampak bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2021 disusun dengan menjaga keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan berbagai dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional, serta keterkaitannya dari sisi penganggaran. Keterkaitan dan konsistensi dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,

berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD tahun 2021, yaitu:

- a. Menyinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan Provinsi yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Tahun 2021 dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Barito Timur;
- b. Sebagai landasan untuk sinkronisasi antara prioritas dan program strategis Provinsi dengan prioritas dan program pembangunan daerah;
- c. Sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah;
- d. Sebagai pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan sebagai rujukan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.

Memuat penjelasan tentang Arah kebijakan ekonomi daerah serta Arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Mengemukakan secara eksplisit Tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan Nasional, prioritas pembangunan Provinsi, prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur, inovasi pemerintahan Kabupaten Barito Timur, keterkaitan dimensi strategi pembangunan Nasional dan Provinsi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Timur.

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun sosial yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat pusat, provinsi maupun daerah.

Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk member panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VIII Penutup.

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten Barito Timur.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Barito Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 3.834 km² (atau 2,50 % dari luas Provinsi Kalimantan Tengah : 153.564 Km²), menduduki urutan kedua belas terluas dari 14 Kabupaten/kota di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, dengan jarak tempuh sekitar 418 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya).

Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang terletak antara 1°2' Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114°-115° Bujur Timur, memiliki batas-batas konfigurasi luar sesuai administratif adalah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan kondisi fisik wilayah (fisiografi) Kabupaten Barito Timur, pada bagian utara dan timur sebagian besar wilayah daratan dengan tingkat ketinggian antara 0 – 50 meter diatas permukaan laut (dpl) dan tingkat kemiringan antara 0 – 8 %, sedangkan pada bagian barat dan selatan terdiri atas daerah rawa. Berdasarkan fisiografi wilayah dapat digolongkan 4 (empat) bagian utama sebagai berikut :

- 1). Hutan Belantara : 146.765 Ha. (38,28 %).
- 2). Rawa – rawa : 122.001 Ha. (31,82 %).
- 3). Sungai / Danau / Genangan Air : 10.467 Ha. (2,73 %).
- 4). Tanah Lainnya : 104.400 Ha. (27,17 %).

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 Kecamatan dan 105 desa/kelurahan. Kecamatan Dusun Timur merupakan kecamatan yang paling luas yaitu 867,70 km² atau sebesar 22,63% dari total luas kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Karusen Janang dengan luas 178 km² (4,64%).

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
1.	Benua Lima	Pasar Panas	258	6,73
2.	Dusun Timur	Tamiang Layang	867,70	22,63
3.	Paju Epat	Telang	664,30	17,33
4.	Awang	Hayaping	203	5,29
5.	Patangkep Tutui	Bentot	255	6,65

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
6.	Dusun Tengah	Ampah	371	9,68
7.	Raren Batuah	Unsum	186	4,85
8.	Paku	Tampa	272	7,09
9.	Karusen Janang	Dayu	178	4,64
10.	Pematang Karau	Bambulung	579	15,10
TOTAL			3.834	100,00

Sumber: Barito Timur Dalam Angka Tahun 2019

b. Kondisi Topografi

Secara topografi, wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian 50-100m diatas permukaan laut dengan kondisi bentang alam sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Pada umumnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0 – 2%, 2- 15% dan 15 – 40%. Wilayah dengan kemiringan 0 – 2% lebih banyak dijumpai di sisi barat, sedangkan wilayah dengan kemiringan 2 – 15% dan 15 – 40% masing-masing dapat dijumpai di sisi tengah yang membentang dari utara hingga selatan. Sementara itu, untuk wilayah dengan kemiringan di atas 40% dapat di jumpai di bagian sisi utara sebelah timur.

c. Geologi dan Tanah

Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Barito Timur adalah Podsolik Merah Kuning (PMK) dan Podsol dengan luas

218.932 Ha, diikuti oleh jenis tanah regosol, organosol, gley dan humus, aluvial dan danau, rawa serta sungai.

Secara umum wilayah Kabupaten Barito Timur mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun. Udaranya relatif panas yaitu siang hari mencapai 34,60°C dan malam hari 21,00°C, sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu mencapai 325,60 mm.

Jenis dan penamaan tanah dilakukan menurut *System Soil Taxsonomy* (USDA, 1999) pada tingkat ordo tanah. Berdasarkan peta tanah tinjau skala 1 : 1.000.000 (Puslitanak 2000) dan Peta *Land System* dan *Land Stability* skala 1 : 250.000 (Report, 1985) di Kalimantan Tengah terdapat 8 (delapan) ordo tanah yang tersebar pada wilayah Kabupaten/Kota yaitu terdiri dari Histosol, Entisol, Inceptisol, Ultisol, Oxisol, Alfisol, Mollisol dan Spodosol.

Demikian juga untuk wilayah Kabupaten Barito Timur yang sebagian besar berada pada wilayah daratan dan perbukitan dengan tanah mineral, terutama mineral, ordo tanah Ultisol, Oxisol, Alfisol dan Mollisol pada lahan kering sebagian besar telah dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama kebun karet dan kelapa sawit.

d. Klimatologi

Adapun karakteristik iklim (Curah Hujan) di wilayah Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Type Iklim | : Tropis Lembab dan Panas (A) |
| 2. Zona Agroklimat | : B 1 |
| 3. Klasifikasi Koppen | : Alfa |
| 4. Suhu Udara | : 21,9 °C – 35,0 °C |
| 5. Curah Hujan rata-rata | : 232,06 mm, rata-rata hujan 205,70
: Hari/Tahun |
| 6. Klasifikasi Schmidt dan Fergusson | Type A (Q = 14,3) dan Type B (Q = 33,3) |

Berdasarkan data curah hujan pada Tahun 2018 di Kabupaten Barito Timur rata-rata curah hujan setiap bulan mengalami penurunan cukup besar yaitu 232,06 mm di tahun 2017 menjadi 205,70 mm di tahun 2018. Penurunan curah hujan terbesar terjadi di bulan Agustus 2018. Meskipun rata-rata curah hujan mengalami penurunan dari 21 hari di tahun 2017 menjadi 17 hari di tahun 2018. Berdasarkan data kecepatan angin lebih banyak berhembus ke arah utara. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Desember dan cenderung merata sepanjang tahun. Perkiraan iklim yang tepat sangatlah penting bagi para petani dan nelayan keramba untuk menentukan musim tanam dan penyebaran bibit ikan yang tepat. Namun perubahan iklim secara global turut mempengaruhi iklim sehingga apabila diamati dengan seksama maka data curah hujan dan angin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 sulit untuk diprediksi seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Karakteristik Curah Hujan, Jumlah Hujan, Kecepatan dan Arah Angin setiap Bulan pada Wilayah Kabupaten Barito Timur 2018

No.	Bulan	Hujan		Angin	
		Curah Hujan (mm)	Jumlah Hujan (hari)	Kecepatan Rata-rata (Knot)	Arah Angin
1.	Januari	26,1	21,00	12,00	Barat
2.	Pebruari	95,3	21,00	15,00	Utara
3.	Maret	54,9	22,00	15,00	Selatan
4.	April	33,6	20,00	14,00	Utara
5.	Mei	17,6	20,00	11,00	Utara
6.	Juni	25,3	14,00	14,00	Utara
7.	Juli	64,4	9,00	18,00	Selatan
8.	Agustus	18,2	7,00	13,00	Selatan
9.	September	52,2	11,00	16,00	Barat Laut
10.	Oktober	71,0	16,00	12,00	Utara
11.	Nopember	84,9	20,00	17,00	Utara
12.	Desember	61,7	23,00	12,00	Utara
	Rata-rata / Mean	50,4	1750	14,1	-

Sumber Data :BPS Kabupaten Barito Dalam Angka 2019

Tenaga ahli dan peralatan yang memenuhi standar untuk mengamati iklim dan cuaca amatlah penting sebagai komponen yang akan menentukan peningkatan hasil panen petani dan nelayan.

e. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Barito Timur memiliki berbagai macam potensi unggulan daerah antara lain dari sektor pertanian, perkebunan sawit dan karet. Sektor kehutanan dalam bentuk produk hasil hutan. Sektor perikanan berupa ikan air tawar dari hasil perikanan tangkap, kolam dan keramba. Sektor peternakan berupa sapi, babi, kambing dan ayam. Sektor pertambangan berupa bahan galian dan

batu bara. Sektor pariwisata berupa kebudayaan daerah, cagar wisata (anggrek alam, goa, air terjun dan danau) dan cagar budaya. Apabila semuanya atau sebagian dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

f. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek).

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 berjumlah 123.557 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 32.493 rumah tangga yang penyebarannya berdasarkan wilayah Kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Ratio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Benua Lima	3.715	3.319	7.034	111,93
2.	Dusun Timur	16.167	15.679	31.846	103,11
3.	Paju Epat	2.690	2.426	5.116	110,88
4.	Awang	3.194	3.047	6.241	104,82
5.	Patangkep Tutui	5.223	4.621	9.844	113,03
6.	Dusun Tengah	13.694	13.241	26.935	103,4
7.	Raren Batuah	4.953	4.445	9.398	111,43
8.	Paku	4.564	4.251	8.815	107,36
9.	Karusen Janang	2.977	2.787	5.764	106,82
10.	Pematang Karau	6.512	6.052	12.564	107,60
	Jumlah	63.6	59.868	123.557	106,38

Sumber Data : BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2019)

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang terbanyak ada di Kecamatan Dusun Timur yaitu 31.846 jiwa dan Dusun Tengah yaitu 26.935 jiwa, ini menggambarkan bahwa kedua Kecamatan tersebut memiliki pusat kekuatan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Kecamatan Dusun Tengah sangat strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang terletak di daerah segi tiga antara Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Barito Selatan. Sedangkan Kecamatan Dusun Timur merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan dan mulai berkembang kearah kota perdagangan.

2. Kondisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Secara umum Sex Ratio di 10 Kecamatan relative sama yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Sex Ratio yang lebih besar dari 100. Pada Tahun 2018 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan pendudukan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 yakni sekitar 31-32 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya tingkat kepadatan tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)		Jumlah Penduduk (jiwa)		Tingkat Kepadatan (jiwa/ Km ²)
		Km2	%	Jumlah	%	
1.	Benua Lima	258,00	6,73	6.928	5,69	27,26
2.	Dusun Timur	867,70	22,63	30.394	25,77	36,70
3.	Paju Epat	664,30	17,33	4.976	4,14	7,70
4.	Awang	203,00	5,29	6.175	5,05	30,74
5.	Patangkep Tutui	255,00	6,65	9.503	7,97	38,60
6.	Dusun Tengah	371,00	9,68	26.433	21,80	72,60
7.	Raren Batuah	186,00	4,85	9.182	7,61	50,53
8.	Paku	272,00	7,09	8.674	7,13	32,41
9.	Karusen Janang	178,00	4,64	5.558	4,67	33,38
10.	Pematang Karau	579,00	15,10	12.431	10,17	21,79
	Jumlah	3.834,00	100	120.254	100	32,23

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2019)

Dari Tabel 4 di atas juga terlihat bahwa Kecamatan Dusun Tengah memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, karena Kecamatan Dusun Tengah mempunyai letak yang strategis dan tempat pertemuan antara Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara sehingga Kecamatan Dusun Tengah memungkinkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, yaitu pusat peredaran barang dan sentra pengembangan pertanian tanaman pangan (lumbung pangan/penyangga pangan Barito Timur).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan berarti semakin rendah tingkat kesejahteraannya, demikian juga sebaliknya.

Rata-rata pengeluaran untuk komoditas makanan tahun 2018 tertinggi adalah untuk makanan dan minuman jadi (29,50%),

ikan (11,18%), padi-padian (11,80%), sedangkan komoditas lainnya berada di bawah 10%. Rata-rata pengeluaran untuk komoditas non makanan 2018 tertinggi adalah untuk komoditas perumahan dan fasilitas perumahan (55,80%), dan terendah adalah keperluan pesta dan upacara (2,71 persen).

1. Pendapatan Perkapita Tahun 2018

Pendapatan perkapita menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat berdasar komoditi yang dihasilkan. Pendapatan perkapita Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan 2010 di Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

Tahun	ADHB (Juta Rp)	Persentase Kenaikan (%)	ADHK (Juta Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2013	41,4	5,51	36,0	3,49
2014	43,2	4,29	36,8	2,26
2015	44,8	3,84	37,6	2,15
2016	48,1	7,30	38,6	2,57
2017*	52,5	9,18	39,7	3,06
2018**	57,0	8,49	40,9	2,92

Sumber Data :BPS Kabupaten Barito Timur (Barito Timur Dalam Angka 2019)

Dari Tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa Perekonomian Kabupaten Barito Timur dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi berdasarkan Harga Berlaku dan berdasarkan Harga Konstan dua-duanya mengalami kenaikan secara nyata. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang positif ini menggambarkan perkembangan proses pembangunan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pendapatan domestik penduduk Kabupaten Barito Timur. Namun demikian, besarnya nilai PDRB perkapita ini masih belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan

masyarakat di setiap strata ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan akan tingginya tingkat kemakmuran bagi masyarakat, karena hal tersebut dipengaruhi juga oleh tingkat pertumbuhan penduduk.

2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian adalah merupakan tatanan atau gambaran keadaan ekonomi suatu daerah yang mana secara makro dapat dibagi kedalam tiga kelompok besar meliputi : primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :

Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 dan ADHB di Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Miliar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017*		2018	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	791,08	941,7	838,77	1.010,2	871,60	1.070,7	957,52	1.170,8	968,49	1.223,6
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.854,99	2.048,0	1.875,46	1.997,2	1.939,92	2.104,9	2.024,58	2.340,1	2.137,42	2.654,5
3.	Industri Pengolahan	224,27	287,9	246,00	336,7	269,99	397,2	291,06	463,4	307,53	490,3
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,77	0,7	0,90	1,0	0,95	1,2	1,05	1,5	1,13	1,7
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	2,7	2,02	3,1	2,19	3,7	2,22	3,9	2,39	4,5
6.	Konstruksi	252,23	311,6	283,43	374,5	308,54	444,8	324,54	505,2	334,27	556,3
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	216,40	280,2	239,78	330,8	261,22	384,2	284,72	439,4	307,99	511,9
8.	Transportasi Dan Pergudangan	156,84	188,7	169,72	220,8	185,78	258,2	200,29	299,5	216,31	350,1
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43,08	56,9	47,21	66,6	51,40	78,6	55,50	90,7	60,01	102,3
10.	Informasi dan Komunikasi	46,29	47,6	51,82	54,9	56,92	64,4	62,24	73,3	67,48	83,0
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,02	52,9	48,62	60,2	53,54	69,0	57,73	78,0	62,47	88,0
12.	Real Estate	77,17	101,8	80,99	113,4	84,58	128,8	91,98	149,2	97,37	170,5
13.	Jasa Perusahaan	2,80	3,6	2,97	4,1	3,13	4,6	3,38	5,5	3,65	6,3
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	126,61	167,9	137,42	192,2	146,61	220,4	155,67	249,3	166,89	285,3
15.	Jasa Pendidikan	155,36	188,6	170,88	226,5	187,88	271,4	204,48	305,7	221,09	349,5

16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,06	65,2	58,89	78,8	64,18	92,5	69,18	104,6	74,65	121,9
17.	Jasa Lainnya	18,35	24,3	19,98	28,9	21,56	32,9	23,43	38,3	25,06	43,3
	PDRB	4.065,16	4.770,2	4.274,84	5.099,0	4.509,97	5.627,6	4.779,59	6.318,3	5.054,20	7.043,1

Sumber Data : *BPS Kabupaten Barito Timur (Barito Timur Dalam Angka 2019)*

Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda ekonomi wilayah berputar meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan sektor andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 masih didominasi oleh Sektor Primer, berarti bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Barito Timur masih bertumpuk kepada tingkat dasar dan sangat tergantung kepada alam. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Barito Timur Berdasarkan Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha untuk Tahun 2014-2018 seperti terlihat pada Tabel 11 berikut ini :

Tabel 11.Distribusi Persentase PDRB Atas dasar harga berlaku di Kabupaten Barito Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Persen)

No.	Sektor	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,74	19,81	19,03	18,53	17,37
2.	Pertambangan dan Penggalian	42,93	39,17	37,40	37,04	37,69
3.	Industri Pengolahan	6,04	6,60	7,06	7,33	6,96
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
6.	Konstruksi	6,53	7,35	7,90	8,00	7,90
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	5,87	6,49	6,83	6,95	7,27
8.	Transportasi Dan Pergudangan	3,96	4,33	4,59	4,74	4,97
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,19	1,31	1,40	1,44	1,45
10.	Informasi dan Komunikasi	1,00	1,08	1,14	1,16	1,18
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,11	1,18	1,23	1,23	1,25
12.	Real Estate	2,13	2,22	2,29	2,36	2,42
13.	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,52	3,77	3,92	3,95	4,05
15.	Jasa Pendidikan	3,95	4,44	4,82	4,84	4,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,37	1,53	1,64	1,66	1,73
17.	Jasa Lainnya	0,51	0,57	0,58	0,61	0,61
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Barito Timur (Barito Timur Dalam Angka 2019)

Berdasarkan Distribusi Prosentase PDRB atas dasar harga konstan 2014-2018, Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 37,70% disusul dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 17,37% serta sektor kontruksi 7,90% dan industri Pengolahan 6,96%.

3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara *series* dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi

program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan melalui peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya. Hal ini akan mendorong peningkatan hasil yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kombinasi antara investasi dalam modal manusia dan modal fisik diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi. Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan adalah produktivitas tenaga kerja (*labor productivity*), dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari tersedianya sarana atau fasilitas pendidikan yang cukup memadai.

Kemudian, berdasarkan kinerja pendidikan Dasar dan Menengah ditinjau dari aspek pemerataan pendidikan, tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Kabupaten Barito Timur

Tahun 2018 sesuai jenjang pendidikan adalah: APS 7-12 sebesar 99,42%, 13-15 sebesar 93,66%, 16-18 sebesar 72,91%, 19-24 sebesar 16,79%.

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 sesuai jenjang pendidikan adalah : APM SD/MI sebesar 99,42%, APM SMP/MTs 74,29%, APM SMA/MA sebesar 64,96%, dan Perguruan Tinggi sebesar 10,71%.

Berdasarkan pada data-data tersebut di atas, beberapa permasalahan pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Barito Timur adalah : (a) masih rendahnya pemerataan pendidikan terutama untuk jenjang SMP dan SMA. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat pembangunan sekolah-sekolah untuk tingkat SMP dan SMA hanya ada di tingkat kecamatan, karena sulit dan jauhnya sehingga siswa usia SMP dan SMA yang berada di daerah kategori sulit tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang tersebut. Selain itu apabila dilihat perbandingan jumlah antar jenjang pendidikan, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD dengan tingkat SLTP apalagi untuk tingkat SLTA.

Khusus untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil harus mendapatkan penanganan yang sangat serius baik dari segi mutu pendidikan maupun prasarana dan sarana. (b) Masih rendahnya kualitas/mutu pendidikan dan relevansinya. Hal ini terkait dengan angka mengulang kelas, angka putus sekolah, kelayakan mengajar guru, kondisi sekolah/ruang kelas banyak yang rusak, terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan seperti; perpustakaan, ruang UKS, Laboratorium, ruang praktik, ruang serbaguna, bengkel dan lapangan olahraga.

2.1.3.2 Keagamaan

Keagamaan menjadi salah satu unsur penting pembangunan masyarakat untuk menjadi bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan rumah peribadatan di Barito Timur terus meningkat setiap tahunnya. Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Barito Timur telah mengarah pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, demikian pula dengan kesadaran serta toleransi antar umat beragama. Namun Kabupaten Barito Timur masih menghadapi munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pluralitas (kemajemukan) etnis, ras, agama dan kultur sebagai suatu realitas sosial yang ada di masyarakat sehingga perlu penanganan secara cermat dan hati-hati dalam pembinaan rasa kebangsaan.

2.1.3.3 Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 sebesar 96,50 mengalami peningkatan cukup besar dibanding Tahun 2015 (sebesar 80,43). Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 sebesar 69.449 orang bertambah sebanyak 7.261 orang dibanding Tahun 2017.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2018 berjumlah 69.449 orang. Dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 71.966 orang atau 55,61% bekerja pada sektor pertanian dan selebihnya 44,39% bekerja pada sektor-sektor lainnya seperti: pertambangan; industri pengolahan; listrik dan air bersih; bangunan; perdagangan, Hotel dan Restoran; pengangkutan

dan telekomunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

Masih tingginya penduduk yang berusaha atau bekerja di sektor pertanian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Barito Timur masih berorientasi pada sektor pertanian. Pada sektor ini tidak menuntut ketrampilan yang cukup tinggi sehingga sektor pertanian merupakan tempat berusaha bagi tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lainnya. Hal ini mendorong tingkat produktivitas pekerja di sektor pertanian cenderung lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.

Untuk jumlah dan persentase penduduk Kabupaten Barito Timur yang menganggur terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 96,50% mengalami peningkatan dibanding Tahun 2015 yaitu sebesar 80,43% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018 sebesar 3,50%. Tahun 2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 80,43% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap sebesar 2,14% atau sebesar 1.417 orang.

2.1.3.4 Prasarana dan Sarana Energi Listrik

Pada tahun 2018 jumlah pelanggan meningkat menjadi 35.265 pelanggan dengan jumlah listrik terjual berjumlah 34.553.898,00 Kwh. Apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Barito Timur tahun 2018 yang berjumlah 32.493 rumah tangga, rumah tangga yang terlayani atau mampu menikmati energi listrik di Kabupaten Barito Timur sekitar 97 persen dari total jumlah rumah tangga.

2.1.3.5 Prasarana dan Sarana Air Bersih

Tahun 2018 jumlah pelanggan PDAM sebesar 4.189 pelanggan terjadi penurunan dari Tahun 2017 dengan jumlah 4.200 pelanggan, terjadi kenaikan sebesar 3,60%. Apabila dibandingkan dengan jumlah air minum yang disalurkan menurut jenis konsumen terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2018 jumlah air minum yang disalurkan sebanyak 744.388 M² sedangkan untuk Tahun 2017 menjadi 965.831 M².

2.1.3.6 Prasarana dan Sarana Pos dan Telekomunikasi

Banyaknya surat pos yang dikirim selama tahun 2018 melalui PT. Pos Indonesia Tamiang Layang dan Ampah tercatat mencapai 71.914 surat. Selain layanan surat pos, terdapat pula layanan paket pos sebanyak 16.077 Kg.

2.1.3.7 Pemerintahan Umum

Terjadinya perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat menuntut adanya restrukturisasi organisasi dan penataan pegawai. Secara kuantitatif penataan pegawai telah mulai dilakukan, namun dalam hal penempatannya masih dijumpai ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pejabat dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang harus diemban. Namun demikian kondisi ini diharapkan akan diantisipasi pada evaluasi struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pada aspek sumber daya manusia aparat pemerintah, profesionalisme dan manajemen kepegawaian masih merupakan masalah besar dalam pembenahan sistem birokrasi daerah pada era

desentralisasi ini. Hal yang pertama dan utama yang dapat dilakukan dalam melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Timur adalah penataan dengan mewujudkan jumlah/komposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi internal (kelembagaan) maupun eksternal instansi pemerintah. Kebutuhan tentu harus bersumber dari kebutuhan daerah untuk melayani masyarakat di daerah.

Selanjutnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, perlu optimalisasi fungsi pengawasan dan perangkat hukum yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baru. Fungsi pengawasan dilakukan dalam upaya menjadi pendorong menuju penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, transparan dan akuntabel. Fungsi pengawasan ini selain dilakukan oleh lembaga pemerintahan (termasuk DPRD) juga dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintahan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial (*social controll*) melalui media yang tersedia.

1. Aparatur Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun 2019 sebanyak 3.700 orang yang terdiri dari PNS Daerah. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah PNS Daerah yang berpendidikan SD berjumlah 14 orang, berpendidikan setingkat SLTP berjumlah 37 orang, berpendidikan setingkat SLTA berjumlah 587 orang, berpendidikan setingkat diploma/akademi berjumlah 721 orang, berpendidikan setingkat universitas (S1) berjumlah 2.110 orang dan pasca sarjana (S2) berjumlah 231 orang.

2. Administratif Pemerintahan

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Barito Timur sampai dengan tahun 2019 memiliki atau membawahi 10 kecamatan dan 100 desa dan 3 kelurahan. Sepuluh Kecamatan tersebut adalah Kecamatan: Benua Lima, Dusun Timur, Awang, Patangkep Tutui, Dusun Tengah, Pematang Karau, Paju Epat, Raren Batuah, Paku dan Karusen Janang.

Untuk Tahun 2020 target desa berstatus swasembada sebanyak 7 desa, Desa berstatus swadaya sebanyak 72 desa dan desa berstatus swakarya sebanyak 22 desa.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Barito Timur terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi

baik komoditas makanan maupun non makanan selama sebulan. Rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama lima tahun terakhir hingga pada tahun 2018 mencapai angka Rp. 605.265,-.

Rata-rata pengeluaran tertinggi komoditas makanan Tahun 2018 adalah untuk makanan dan minuman jadi (29,50%), ikan (11,18%) dan padi-padian (100%), sedangkan komoditas lainnya berada dibawah 10 persen. Rata-rata pengeluaran komoditas non makanan 2018 tertinggi adalah untuk komoditas perumahan dan fasilitas perumahan (55,81%), biaya kesehatan (18,61%) dan barang-barang tahan lama (11,68%).

Tabel 12 : Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Makanan di Kabupaten Barito Timur (Rp)

No.	Tahun	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2014	570.814	535.142	1.105.956
2	2015	512.031	611.432	1.123.463
3	2016	555.760	653.629	1.209.389
4	2017	602.120	481.779	1.083.899
5	2018	605.265	561.621	1.166.886

Sumber: Bartim Dalam Angka 2019

b. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, keberlangsungan dan

kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi.

Kriminalitas

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Barito Timur. Secara umum, angka kriminalitas di Kabupaten Barito Timur cukup fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Dilaksanakannya evaluasi ini akan memberikan masukan mengenai ketidakcocokan atau kesalahan penetapan program prioritas, permasalahan baru yang timbul, hingga inefisiensi anggaran sehingga untuk perencanaan pembangunan ke depan dapat diantisipasi segala kendala maupun hambatan. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Timur.

Pada penyusunan RKPD Kabupaten Barito Timur 2020, hasil evaluasi dari status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah didasarkan atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018. Selain itu, evaluasi yang

tidak kalah pentingnya adalah realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja setiap SKPD pada tahun sebelumnya dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program terhadap target RKPD tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Urusan wajib bidang pendidikan terbagi menjadi fokus pendidikan secara umum, pendidikan dasar, pendidikan SLTP dan pendidikan SLTA atau pendidikan menengah. Berikut ini tabel hasil evaluasi bidang pendidikan.

Tabel 13
Capaian Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	68,60					45,95				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/Paket A	107,24					91,36				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B	82,95					80,51				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A	98,67					82,4				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B	75,85					58,59				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Pada indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) belum tercapai karena dari data Dapodik berubah setiap semester genap/ganjil sehingga data selalu berubah peserta didiknya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A belum tercapai karena beberapa faktor yaitu kurangnya motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, anak tidak punya niat untuk sekolah (malas belajar di sekolah) ekonomi orang tua yang tidak memadai.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B belum tercapai karena beberapa faktor yaitu anak tidak berminat untuk sekolah, kurang motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, ekonomi orang tua yang lemah, jauhnya jarak sekolah dari tempat tinggal.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A belum tercapai karena beberapa faktor yaitu pendapatan orang tua yang kurang (ekonomi lemah), lingkungan yang tidak mendukung pendidikan (kurang pengetahuan tentang pentingnya pendidikan).

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B belum tercapai karena beberapa faktor yaitu anak tidak berminat untuk sekolah, kurang motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, ekonomi orang tua yang lemah, jauhnya jarak sekolah dari tempat tinggal.

2. Urusan Kesehatan

Pada urusan Pemerintahan bidang kesehatan, mayoritas indikator RPJMD pada tahun 2014 dan 2019 sudah masuk dalam kategori hijau atau sudah berhasil melampaui target yang sudah

ditetapkan, hanya satu indikator yang masuk kategori kuning yaitu rasio dokter per satuan penduduk.

Tabel 14
Capaian Indikator Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	5/1000					0/1000 KH				
	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	5/1000					0/1000				
	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	5/1000					15/1000				
	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	120/100.000					2/100.000				
	Rasio Posyandu per satuan balita	2					1:2				
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1					1:1				
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1					0,8/100.000				
	Rasio Dokter per satuan penduduk	30					1:3.666				
	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	100%					35,61%				
	Cakupan Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	90%					69,03 %				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%					85%				
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%					-				
	Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	95%					80%				
	Cakupan balita pneumonia yang di tangani	100%					14%				
	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%					100%				
	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	100%					41,36%				
	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	0					0				
	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%					8,50%				
	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	85%					88,31%				
	Cakupan	100%					100%				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD										
	Penderita diare yang di tangani	100%					81,03%				
	Cakupan Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	100%					100%				
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%					100%				
	Cakupan kunjungan bayi	100%					73,30%				
	Cakupan Puskesmas	1					1				
	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	100%					73,43%				
	Cakupan pelayanan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan	100%					81,92%				
	Cakupan neonatus dengan komplekasi yang di tangani	100%					20,33%				
	Cakupan pelayananbay	100%					72,85%				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	i baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart										
	Cakupan pelayanan anak balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%					81%				
	Presentase balita gizi kurang	< 0.045%					0,06%				
	Prevalensi balita stunting	15%					10,18%				
	Persentase gizi buruk dan gizi kurang yang ditangani	100%					100%				
	Cakupan Desa Siaga Aktif	70%					70%				
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%					100%				
	Cakupan anak usia pendidikan dasar kelas 1	100%					100%				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar										
	Jumlah Pengunjung usia 15-59 Tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%					44,77%				
	Jumlah Pengunjung usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100%					33,70%				
	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%					27,80%				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%					30,70%				
	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) diwilayah kerja kabupaten/ko ta yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%					100%				
	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit	100%					100%				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Tabel di atas menunjukan capaian pada bidang kesehatan pada tahun 2019-2023. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup menunjukkan tidak ada angka kematian. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, Rasio Dokter per satuan penduduk, Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani, Cakupan Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), Presentase

anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap, Cakupan balita pneumonia yang di tangani, Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk), Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS, Cakupan pelayanan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan, Cakupan neonatus dengan komplekasi yang di tangani, Cakupan pelayanan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart, Cakupan pelayanan anak balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun target capaian indikator kinerja masih belum tercapai dimana realisasi masih dibawah target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.

Indikator Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup, Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun, Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk), Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, Cakupan Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan Puskesmas, Presentase balita gizi kurang, Prevalensi balita stunting, Persentase gizi buruk dan gizi kurang yang ditangani, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin, Cakupan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar, Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) diwilayah kerja

kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun, Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit target capaian indikator tercapai bahkan melampaui target.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nilai capaian indikator urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kabupaten Barito Timur pada tahun 2019 - 2023.

Tabel 15
Capaian Indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PUPR	Persentase panjang jalan kondisi baik	54,65					64,01				
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,69%					64,01%				
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	61,69%					64,01%				
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	77,29%					90,60%				
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	50%					45,51%				
	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	20%					25,27%				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	20%					22,33%				
	Rasio Jaringan Irigasi	30%					38,27%				
	Persentase penduduk berakses air minum	74,07%					90,60%				
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan & perdesaan	74,07%					74,01%				
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	30%					0,40%				
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	30%					-				
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	30%					-				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Secara umum capaian urusan PUPR pada tahun 2019 sudah baik, dimana nilai capaian mayoritas sudah tercapai bahkan ada yang melampaui target. Indikator Persentase panjang jalan kondisi baik melampaui target RPJMD dengan panjang jalan dalam kondisi baik 520,50 km dan panjang seluruh jalan di Kab. Barito Timur 813,19 km, jadi panjang jalan yang direhabilitasi /

direkonstruksi dalam 4 tahun adalah 292,69 km; Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik melampaui target RPJMD dengan panjang jalan dalam kondisi baik 520,50 km dan panjang seluruh jalan di Kab. Barito Timur 813,19 km, jadi panjang jalan yang direhabilitasi / direkonstruksi dalam 4 tahun adalah 292,69 km; Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) Tercapai (panjang jalan dalam kondisi baik 520,50 km dan panjang seluruh jalan di Kab. Barito Timur 813,19 km, jadi panjang jalan yang direhabilitasi / direkonstruksi dalam 4 tahun adalah 292,69 km); Persentase rumah tinggal bersanitasi tercapai (jumlah unit rumah tangga yang bersanitasi adalah 29.440 unit dari jumlah rumah tangga di Kab. Barito Timur 32.392 unit); Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun tercapai karena semakin sedikit persentase luas genangan banjir, maka target capaian pekerjaan Pengelolaan Rawa dan Banjir tercapai; Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor tercapai (pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor seluas 22.868 Ha dan luas wilayah aliran sungai rawan longsor 89.685 Ha).

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tercapai (panjang saluran primer, sekunder dan tersier Kab. Adalah 101,50 km dan panjang irigasi Kab. Dalam kondisi tidak baik yang dikelola Kab. 22,67 km); Rasio Jaringan Irigasi tercapai (panjang saluran primer, sekunder dan tersier Kab. Adalah 59,23 km dan panjang irigasi Kab. Dalam kondisi tidak baik yang dikelola Kab. 22,67 km); Persentase penduduk berakses air minum tercapai (jumlah unit rumah tangga yang bersanitasi

adalah 29.440 unit dari jumlah seluruh unit di Kab. Barito Timur 32.392 unit); Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Target belum tercapai karena proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan adalah 24.048 unit dari jumlah unit rumah di Kab. Barito Timur 32.493 unit.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Belum tercapai karena Luas Ruang Terbuka Hijau 1.526,28 Ha, sehingga tidak mencapai target Luas Ruang Terbuka Hijau 20% dari luas Kab. Barito Timur 76.680,00; Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Belum tercapai karena tidak ada program untuk menunjang indikator; Ruang publik yang berubah peruntukannya Belum tercapai tercapai karena tidak ada program untuk menunjang indikator.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berikut ini nilai capaian indikator urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 16
Capaian Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Perkim	Persentase RT yang terakses air bersih	84,13					74,01				
	Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	23,17					-				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)	97,35					99,19				
	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	83,00					-				
	Persentase RTH Publik yang terkelola	1%					0,59%				
	Rasio rumah layak huni	95,11%					90,60%				
	Pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah Perkotaan (m')	10.000					5.836				
	Rehabilitasi Rumah Layak Huni (unit)	1.500									
	Persentase permukiman yang tertata	70%									
	Persentase luas permukiman kumuh										
	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan										
	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan										
	Peningkatan Kualitas lingkungan pada kawasan kumuh desa tertinggal, desa tradisional, dan desa nelayan	0									

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator pada bidang ini pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ada beberapa data yang tidak tersedia seperti Rehabilitasi Rumah Layak Huni (unit); Persentase permukiman yang tertata; Persentase luas permukiman kumuh; Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan; Persentase rumah tangga kumuh perkotaan; Peningkatan Kualitas lingkungan pada kawasan kumuh desa tertinggal, desa tradisional, dan desa nelayan.

Persentase RT yang terakses air bersih Belum tercapai karena jumlah rumah tangga pengguna air bersih hanya 24.048 dari jumlah seluruh rumah tangga 32.493; Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%) Tidak ada alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2019; Persentase RTH Publik yang terkelola Belum tercapai karena alokasi yang dianggarkan tidak mencukupi untuk memenuhi target tersebut; Rasio rumah layak huni Belum tercapai karena jumlah rasio rumah layak huni hanya 29.440 dari jumlah seluruh di Kab. Barito Timur 32.493; Pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah Perkotaan (m') Belum tercapai karena alokasi yang dianggarkan tidak mencukupi untuk memenuhi target tersebut. Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%) tercapai melampaui target RPJMD.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut ini nilai capaian indikator urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 17
Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Satpol PP dan Damkar	Persentase pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur	100%					85%				
	Persentase Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran sebagai Aparatur Pemerintah Daerah	100%					100%				
	Terlaksananya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan kebakaran	100%					85%				
	Cakupan wilayah pelaksanaan deteksi dini ancaman keamanan	100%					85%				
	Persentase potensi gangguan keamanan yang terdeteksi	100%					85%				
	Cakupan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi lainnya	70%					0				
	Cakupan wilayah pendidikan politik masyarakat	100%					0				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi	70%					63%				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Hasil capaian indikator pada Tahun 2019 menunjukkan masih banyak indikator yang belum tercapai seperti : Persentase pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur Belum tercapai karena anggaran terbatas, kekurangan SDM dan sarana prasarana ; Terlaksananya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan kebakaran Belum tercapai karena anggaran terbatas, kekurangan SDM dan sarana prasarana ; Cakupan wilayah pelaksanaan deteksi dini ancaman keamanan Belum tercapai karena anggaran terbatas, kekurangan SDM dan sarana prasarana ; Persentase potensi gangguan keamanan yang terdeteksi Belum tercapai karena anggaran terbatas, kekurangan SDM dan sarana prasarana ; Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi Belum tercapai karena anggaran terbatas, kekurangan SDM dan sarana prasarana.

Indikator Persentase Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran sebagai Aparatur Pemerintah Daerah mencapai target RPJMD. Sedangkan untuk indikator Cakupan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi lainnya ; Cakupan wilayah pendidikan politik masyarakat Tidak terakomodir dalam kegiatan.

6. Urusan Sosial

Berikut ini nilai capaian indikator urusan Pemerintahan bidang Sosial.

Tabel 18
Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%					54%				
	Prosentase PMKS yang tertangani	100%					62%				
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%					50%				
	Prosentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau sekelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%					56%				
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100%					41%				
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%					-				
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%					30%				
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	100%					-				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	prasarana tanggap darurat lengkap										
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%					32%				
	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	100%					92%				
	Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di luar panti	100%					95%				
	Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	100%					99%				
	Prosentase Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	100%					9%				
	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota	100%					8%				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas indikator pada bidang Sosial belum tercapai seperti : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Belum tercapai karena SDM pada Dinas Sosial belum optimal dalam penanganan PMKS; Prosentase PMKS yang tertangani Belum tercapai karena SDM pada Dinas

Sosial belum optimal dalam penanganan PMKS; Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Belum tercapai karena SDM pada Dinas Sosial belum optimal dalam penanganan PMKS; Prosentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau sekelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Belum tercapai karena kurang pendampingan dan monitoring pada KUBE; Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Belum tercapai karena pengelolaan yang belum maksimal; Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Belum tercapai karena pengelolaan yang belum maksimal; Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Belum tercapai karena pengelolaan yang belum maksimal.

Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti; Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di luar panti; Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial; Prosentase Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti Belum tercapai karena di Barito Timur tidak tersedia data Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis; Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota Belum tercapai karena pengelolaan yang belum maksimal.

7. Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, digunakan indikator berikut ini nilai capaian tiga indikator pada tahun 2019.

Tabel 19
Capaian Indikator Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tenaga Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	61.361					71.966				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	82,18					96,50				
	Tingkat pengangguran terbuka	1,66					3,50				
	Rasio penduduk yang bekerja	95,41					96,50				
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	80,81					76,61				
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	23,13					21,69				
	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	50					20				
	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45					18				
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1.224					395				
	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program	3.626					6.569				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jamsostek										
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30					10				
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	115					51				
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	5					-				
	Rasio lulusan S1/S2/S3	9,69					13,79				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Ada beberapa indikator yang telah tercapai dan melampaui target RPJMD seperti : Angka partisipasi angkatan kerja; Tingkat partisipasi angkatan kerja; Tingkat pengangguran terbuka; Rasio penduduk yang bekerja; Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek; Rasio lulusan S1/S2/S3.

Indikator yang belum tercapai terdiri dari : Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas; Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja; Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Belum tercapai karena di Disnakertrans dari PB 18 kasus dilanjutkan ketingkat PTUN (2kasus) Anjuran; Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Belum tercapai (kasus di tingkat kab. Melalui mediasi oleh mediator Disnaker); Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Belum tercapai (sesuai daftar pencari kerja

atau pembuat kartu kuning yang sudah bekerja); Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Belum tercapai karena terbatasnya pelaksanaan kegiatan disebabkan rasionalisasi; Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Belum tercapai karena terbatasnya pelaksanaan kegiatan disebabkan rasionalisasi; Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Rasionalisasi anggaran.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut ini capaian indikator pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 20
Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
DP3A	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,19					53,40				
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30					28				
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	42,065					41,456				
	Rasio KDRT	0,0125					0,0154				
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	1,5					0,05				
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	95,15					95,72				
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan	100					100				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu										
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100					100				
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100					100				
	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	78					76,50				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Nilai capaian bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 ada beberapa indikator yang berhasil mencapai target RPJMD seperti Partisipasi angkatan kerja perempuan; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit; Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban

kekerasan; Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; Rasio KDRT.

Indikator yang masih belum mencapai target seperti : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR; Partisipasi perempuan di lembaga swasta; Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur; Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

9. Urusan Pangan

Berikut ini capaian indikator pada urusan wajib bidang pemuda dan olah raga.

Tabel 21
Capaian Indikator Bidang Pangan Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pangan	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	91,4					82,3				
	Penguatan cadangan pangan	2 Gapoktan					1 Gapoktan				
	Penanganan daerah rawan pangan	1 dokumen					1 dokumen				
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	93,79%					97,90%				
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1 dokumen					1 dokumen				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)

Belum tercapai karena berdasarkan data hasil survei dan analisa,

skor Pola Pangan Harapan Kab. Barito Timur Tahun 2019 berdasarkan SUSENAS Tahun 2018 ialah sebesar 82,3% nilainya turun bila dibandingkan Tahun 2018 yang mencapai 90,2%. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019 mengalami penurunan karena adanya penurunan mutu konsumsi pangan penduduk yang menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman. Hal ini juga dapat dipengaruhi faktor ekonomi seperti menurunnya daya beli masyarakat, harga pasokan bahan pangan yang naik dan ketersediaan serta distribusi pasokan bahan pangan itu sendiri; Penguatan cadangan pangan Belum tercapai karena hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan dana anggaran pendukung yang belum memadai dan sumber daya manusia (Gapoktan) serta infrastruktur penunjang untuk menumbuhkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang baru yang akan dikelola oleh Gapoktan. Selain itu diperlukan juga CP/CL Gapoktan dan daerah mitra produksi pangan serta kajian untuk membentuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang baru melalui tahapan penumbuhan, pengembangan, kemandirian, pasca kemandirian serta exit strategy dan penambahan infrastruktur penunjang berupa sarana penyimpanan (gudang) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang baru yang dimiliki dan dikelola oleh Gapoktan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan pangan guna mendistribusikan dan memasarkan hasil pangannya.

Indikator Penanganan daerah rawan pangan; Ketersediaan energi dan protein perkapita; Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mencapai target RPJMD.

10. Urusan Pertanahan

Berikut ini nilai capaian indikator bidang Pertanahan

Tabel 22
Capaian Indikator Bidang Pertanahan Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanahan	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan	1.560					1.559				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator bidang pertanahan Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan Belum tercapai 1 bidang karena masuk kawasan hutan sempadan sungai (bidang Sertifikasi Wakaf).

11. Urusan Lingkungan Hidup

Berikut ini nilai capaian indikator bidang lingkungan hidup

Tabel 23
Capaian Indikator Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	0					0				
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0					0				
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	0					1 kegiatan				
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	57,32					35				
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	96					90,722				
	Persentase kualitas Tutupan Lahan	49					47,71				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	22 perusahaan					22 perusahaan				
	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten / Kota	0					0				
	Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota	0					0				
		0 gps,					0 gps				
		1 paket alat lab,					1 paket alat lab.				
		1 mobil					1 mobil				
		6 motor					6 motor				
		1 drone					1 drone				
	Timbulan Sampah yang ditangani	17.908 ton/tahun					17.598,23 ton/tahun				
	jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	10 ton/tahun					0				
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	80%					92,59%				
	Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di kabupaten	Open dumping					Open dumping				
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0					0				
	Terlaksananya	35					35				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	pengawasan dan pemantauan pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)										
	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0					0				
	Persentase tersedianya data emisi gas rumah kaca (IGRK)	55					5				
	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Ekosistem dan Keanakeragaman Hayati)	58					24				
	Presentase lahan kritis yang tertangani	57									
	Terlaksananya inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)/hak ulayat	1 kegiatan					0 kegiatan				
	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	3 dokumen					3 dokumen				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Nilai capaian bidang Lingkungan Hidup tahun 2019 ada beberapa indikator yang berhasil mencapai target RPJMD seperti Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi; Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota; Persentase jumlah sampah yang tertangani; Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di kabupaten; Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator yang belum tercapai antara lain : Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air; Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara; Persentase kualitas Tutupan Lahan; Timbulan Sampah yang ditangani; Persentase tersedianya data emisi gas rumah kaca (IGRK); Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Ekosistem dan Keanakeragaman Hayati). Untuk indikator Presentase lahan kritis yang tertangani; Terlaksananya inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)/hak ulayat masih belum ada data.

Indikator Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota masih belum tersusun; Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota masih belum terintegrasi.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut ini nilai capaian indikator pada urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 24
Capaian Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Dukcapil	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,83					1,33				
	Rasio bayi berakte kelahiran	0,94					0,70				
	Persentase Penduduk berKTP-el Per Satuan Penduduk	87,66%					100%				
	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	6.762					3.712				
	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	426					376				
	Jumlah Penduduk Kabupaten	114.048					113.974				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Empat (4) indikator pada bidang ini yang belum tercapai antara lain : Rasio bayi berakte kelahiran belum tercapai karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kelahiran untuk segera dicatat oleh Disdukcapil serta terbatasnya SDM petugas khusus yang menangani; Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran belum tercapai karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kelahiran untuk segera dicatat oleh Disdukcapil serta terbatasnya SDM petugas khusus yang menangani; Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan belum tercapai karena masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan/ mencatatkan

peristiwa perkawinannya, serta terbatasnya SDM petugas khusus yang menangani; Jumlah Penduduk Kabupaten belum tercapai karena penambahan jumlah penduduk sangat tergantung dengan banyaknya angka kelahiran yang dilaporkan dan tergantung pula dengan perubahan angka pindah/dating penduduk.

Indikator yang sudah tercapai terdiri dari : Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk; Persentase Penduduk berKTP-el Per Satuan Penduduk.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 25
Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
DPMD	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	210					350				
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	80					85				
	Jumlah Desa berstatus swasembada	5					8				
	Jumlah Desa berstatus swadaya	73					62				
	Jumlah Desa berstatus swakarya	23					31				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Pada tahun 2019 ada 4 indikator yang tercapai antara lain :
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK;

Jumlah Desa berstatus swasembada; Jumlah Desa berstatus swakarya meningkat dari target RPJMD yang telah ditetapkan, dan ada 1 (satu) indikator yang masih belum tercapai yaitu Jumlah Desa berstatus swadaya Belum tercapai karena ada 11 Desa yang sudah meningkat satunya menjadi Desa Swakarya dan Desa Swasembada.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Tabel 26
Capaian Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
DPPKB	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,81%					2,36%				
	Total Ferlity Rate (TFR)	2,53%					2,40%				
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	68,00%					70%				
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	10%					16,498%				
	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1					30,4				
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil	1					20,108				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	(parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan										
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	10					-				
	rata-rata jumlah anak per keluarga	2,53					2,5				
	ratio akseptor KB	80,5					79,4				
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	79,55%					79,4				
	angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	11					33,45				
	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	100%					70%				
	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	11,20%					10,35%				
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	72%					70%				
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	14,45%					13,04%				
	Cakupan anggota keluarga bina keluarga balita (BKB) ber-KB	70%					57%				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	60%					45%				
	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	60%					40%				
	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	3					3				
	cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja /Mahasiswa	60%					255				
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	60%					60%				
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	60%					55,35%				
	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1					1				
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%					100%				
	persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%					100%				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	91%					53,05%				
	persentasi remaja yang terkena infensi menular seksual (IMS)	-					-				
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	23					23%				
	cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60%					53,05%				
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	>20 tahun					-				
	persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembanguna keluarga melalui APBD dan APBDes	70%					90%				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

15. Urusan Perhubungan

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Perhubungan :

Tabel 27
Capaian Indikator Bidang Perhubungan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Perhubungan	Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik	70%					66%				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase cakupan area pelayanan	70%					67%				

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Nilai capaian indikator pada urusan wajib bidang Perhubungan masih belum tercapai pada indikator Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik; Persentase cakupan area pelayanan.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang komunikasi dan informatika.

Tabel 28
Capaian Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kominfo	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik radio	50					23				
	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik televisi	-					38				
	Jumlah Pemirsa Radio dan Televisi milik pemerintah daerah	100					50				
	Jumlah Radio siaran milik pemerintah daerah	-					-				
	Jumlah Televisi kabel/UHF milik pemerintah daerah	-					-				
	Jumlah desa yang diberikan bantuan pesawat radio dan televisi sebagai	-					-				
	sarana informasi pedesaan										

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah media luar ruang dan konvensional yang didiseminasikan/dipublikasi kepada masyarakat	50					80				
	Jumlah Media Sosial Elektronik milik pemerintah daerah	2					14				
	Jumlah pengikut/follower/subscriber Media Sosial Elektronik milik pemerintah daerah	1.000					4.980				
	Jumlah fasilitas layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID	-					1				
	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	-					-				
	Rasio pengaduan yang ditangani terhadap pengaduan yang diterima	-					-				
	Jumlah sarana pengaduan yang tersedia untuk masyarakat	2					2				
	Jumlah Data Center (server) milik Pemerintah Daerah	1					1				
	Jumlah Media Website milik pemerintah daerah	5					20				
	Jumlah pengunjung website milik pemerintah daerah	190.000					194.195				
	Jumlah Kantor OPD/UPTD Terkoneksi Jaringan Internet/Intranet	5					29				
	Jumlah Rata-Rata Kecepatan internet/Bandwidth Kantor OPD/UPTD	5					10				
	Jumlah Media Center milik Pemerintah Daerah	-					1				
	Jumlah Aplikasi milik Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	2					5				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Email go.id untuk OPD dan ASN Pemerintah Daerah	43					54				
	Jumlah Command Center milik Pemerintah Daerah	-					-				
	Jumlah CCTV terpasang di ruang publik dan fasilitas vital milik Pemerintah Daerah	2					--				
	Jumlah Security Operation Center (SOC) milik Pemerintah Daerah	-									
	Jumlah Layanan Internet di Ruang Publik	1					2				
	Jumlah pengunjung/ pengguna fasilitas internet di ruang publik	3.000					3.000				
	Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau layanan telekomunikasi yang berkualitas	60					60				
	Jumlah UMKM di Barito Timur yang dilatih/ diberdayakan dalam pemanfaatan media online (e-commerce)	-					-				
	Jumlah UMKM di Barito Timur yang menjalankan usaha melalui media online (e-commerce)	-					-				
	Prosentase jumlah relawan TIK terhadap desa di Kabupaten Barito Timur	-					-				
	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/Komunitas Kreatif bidang TIK	-					-				
	Jumlah Pusat Komunitas Kreatif	-					-				
	Jumlah Angkatan Kerja Muda yang difasilitasi untuk memperoleh pelatihan TIK bersertifikat Standar	-					-				
	Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)										

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

Tabel 29
Capaian Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Koperasi, UMKM	Persentase koperasi aktif	54,18					44,7				
	Jumlah Koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam aktif	28					26				
	Jumlah UMKM aktif	15.353					15.328				
	Jumlah usaha mikro dan kecil yang memiliki IUMK	500					147				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Persentase koperasi aktif belum tercapai karena adanya rasionalisasi anggaran revitalisasi koperasi karet dan gabah, dimana dengan adanya revitalisasi diharapkan adanya peningkatan koperasi aktif; Jumlah Koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam aktif belum tercapai karena KSP/USP yang diharapkan melaksanakan RAT, ternyata tidak RAT; Jumlah UMKM aktif belum tercapai karena adanya UMKM yang tidak aktif; Jumlah usaha mikro dan kecil yang memiliki IUMK belum tercapai karena ada 10 Kecamatan yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan IUMK, baru 4 Kecamatan. Pihak dinas sudah melakukan sosialisasi, sehingga diharapkan Tahun 2020 Semua Kecamatan bisa mengeluarkan IUMK.

18. Urusan Penanaman Modal

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Penanaman Modal :

Tabel 30
Capaian Indikator Bidang Penanaman Modal
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Penanaman Modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	700					21				
	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	7					5				
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	79					26				
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	30.513.972.739.142					2.958.202.000.000				
	Rasio daya serap tenaga kerja						-				
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	30.065.980.311.537					2.958.202.000.000				
	PMDN (milyar rupiah)	311.537					000.000				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Nilai investasi berskala nasional (PMDN) belum tercapai karena tidak ada investasi baru masuk ke Kab. Barito Timur Skala Usaha Nasional Tahun 2019. Dan yang ada tersebut investasi penambahan dari investasi yang sudah beraktivitas (Data tembusan dari BKPMRI); Nilai investasi berskala nasional (PMA) belum tercapai karena tidak ada investasi baru masuk Penanaman Modal Asing (PMA) ke Kab. Barito Timur Tahun 2019. Dan yang

ada tersebut investasi penambahan dari investasi yang sudah beraktivitas (Data tembusan dari BKPMRI); Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) belum tercapai karena tidak ada investasi baru masuk Penanaman Modal Asing (PMA) ke Kab. Barito Timur Tahun 2019. Dan yang ada tersebut investasi penambahan dari investasi yang sudah beraktivitas (Data tembusan dari BKPMRI); Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) belum tercapai karena Investasi baru dan Investasi penambahan Tahun 2019, usaha yang sedang berjalan ; Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Belum tercapai karena Investasi baru dan Investasi penambahan Tahun 2019, usaha yang sedang berjalan.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Kepemudaan dan Olahraga :

Tabel 30
Capaian Indikator Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pemuda dan Olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70%					70%				
	Persentase organisasi olahraga yang aktif	70%					70%				
	Jumlah Pelatih yang bersertifikasi	45					27				
	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	215					44				
	Jumlah atlet berprestasi	186					152				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Terdapat 2 (Dua) Indikator yang tercapai yaitu Persentase organisasi pemuda yang aktif; Persentase organisasi olahraga yang aktif. Sedangkan yang masih belum tercapai yaitu indikator Jumlah Pelatih yang bersertifikasi belum tercapai karena kurang kegiatan pelatihan dan juga anggaran yang memadai; Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana olah raga belum tercapai karena masih minimnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasaran olahraga; Jumlah atlet berprestasi belum tercapai karena minimnya pembinaan dan kompetensi.

20. Urusan Statistik

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Statistik :

Tabel 31
Capaian Indikator Bidang Statistik
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Statistik	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada					ada				
	Buku ”kabupaten dalam angka”	ada					ada				
	Buku ”PDRB”						ada				
	Cakupan ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah	60%					70%				
	Jumlah Lab Statistik Center milik Pemerintah Daerah	-					-				
	Jumlah Administrasi Statistik Sektoral yang dipublikasikan secara elektronik	-					-				
	Jumlah Produk Administrasi Statistik Sektoral yang dipublikasikan kepada masyarakat	1					1				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Terdapat 5 (Lima) Indikator yang tercapai yaitu Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi; Buku "kabupaten dalam angka"; Buku "PDRB"; Jumlah Produk Administrasi Statistik Sektoral yang dipublikasikan kepada masyarakat; Cakupan ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah Tercapai (DDA baru 70% data yang masuk dan masih perlu konfirmasi lagi data ke Dinas. Dan 2 (dua) indikator data tidak tersedia yaitu Jumlah Lab Statistik Center milik Pemerintah Daerah; Jumlah Administrasi Statistik Sektoral yang dipublikasikan secara elektronik.

21. Urusan Persandian

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Persandian :

Tabel 32
Capaian Indikator Bidang Persandian
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persandian	Cakupan informasi pemerintah penting yang tersandikan	60%					-				
	Tingkat ketersediaan dukungan peralatan persandian	75%					-				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

22. Urusan Kebudayaan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Kebudayaan :

Tabel 33
Capaian Indikator Bidang Kebudayaan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	5					5				
	Jumlah pembinaan terhadap kelompok penyelenggara seni dan budaya.	14					10				
	Jumlah Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dilestarikan	225					220				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya tercapai (sesuai dengan target RPJMD); Jumlah pembinaan terhadap kelompok penyelenggara seni dan budaya belum tercapai karena walaupun sanggar seni di Barito Timur sangat banyak hanya saja kurangnya event dan anggaran yang tidak memadai menjad kendala dalam pembinaan; Jumlah Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dilestarikan belum tercapai karena hak kepemilikan menjadi kendala dalam pemeliharaan dan pelestarian beberapa situs budaya maupun cagar budaya.

23. Urusan Perpustakaan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Perpustakaan :

Tabel 34
Capaian Indikator Bidang Perpustakaan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	6.240					13.983				
	Koleksi bahan Pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah	20.000					20.014				
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.152					8.961				
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat	1					-				
	Peningkatan Jumlah:						-				
	Perpustakaan Desa	37					37				
	Tenaga Pengelola Perpustakaan	72					20				
	Koleksi Perpustakaan	3.700					559				
	Penyediaan Akses Internet kepada Pengunjung	1					-				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai target seperti :
 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun; Koleksi bahan Pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah; Jumlah koleksi judul buku perpustakaan; Perpustakaan Desa.

Indikator Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat Masih belum ada Tenaga Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilaian yang memiliki sertifikat; Tenaga

Pengelola Perpustakaan belum tercapai karena banyak Perpustakaan Desa yang tidak aktif dan banyak Desa yang belum punya Perpustakaan; Koleksi Perpustakaan belum tercapai karena jumlah pengadaan buku Tahun 2019 hanya 559 karena kendala anggaran; Penyediaan Akses Internet kepada Pengunjung tidak ada pelaksanaan karena baru akan dilaksanakan Tahun 2020.

24. Urusan Kearsipan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Kearsipan :

Tabel 35
Capaian Indikator Bidang Kearsipan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kearsipan	Pembinaan kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	7					-				
	Pengolahan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	55					75				
	Pembinaan Sumber daya Manusia (SDM) Kearsipan	2					10				
	Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol Masyarakat	2					10				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Terdapat 3 (tiga) indikator yang mencapai target seperti :
 Pengolahan Arsip Dinamis dan Arsip Statis; Pembinaan Sumber daya Manusia (SDM) Kearsipan; Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol Masyarakat. Sedangkan untuk indikator Pembinaan kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk OPD Tahun

2019 belum terlaksana, rencana akan dilaksanakan Tahun 2020. Pelaksanaan Tahun 2019 hanya untuk Desa saja yaitu dari 101 Desa yang dilaksanakan hanya 65, terkendala masalah anggaran.

25. Urusan Pariwisata

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Pariwisata :

Tabel 36
Capaian Indikator Bidang Pariwisata
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pariwisata	PDRB Sektor pariwisata	0,42%					7,22				
	Jumlah kunjungan wisatawan	11.479					13.283				
	Jumlah obyek wisata yang dipasarkan	31					32				
	Jumlah destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan	15					18				
	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	5					5				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Semua indikator yang mencapai target seperti : PDRB Sektor pariwisata ; Jumlah kunjungan wisatawan ; Jumlah obyek wisata yang dipasarkan ; Jumlah destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan; Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina Tercapai target (2 Desa belum membentuk kelompok Sadar Wisata).

26. Urusan Pertanian

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Pertanian :

Tabel 37
Capaian Indikator Bidang Pertanian
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian	Luas Sawah	10.829					10,913				
	Produktivitas Padi Sawah	31,63					32,06				
	Produktivitas Padi Ladang	14,72					15,49				
	Produksi Padi	38.579					2.608				
	Jumlah Produksi Daging (Sapi,kambing, babi)	105,81					145,45				
	Jumlah Produksi Dagingayam/ unggas	456,55					578,64				
	Rasio kasus temuan bahan pangan asal hewan tidak layak konsumsi yang ditangani	100%					100				
	Jumlah Anjing yang di Vaksin untuk mencegah kasus Rabies	8.144					6.793				
	Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat	54.460,18					54.288,18				
	Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat	66,72					66,72				
	Luas Lahan Perkebunan Kakao Rakyat	121,01					121,01				
	Luas Lahan Perkebunan Sawit Rakyat	499,65					491,97				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Luas Sawah; Produktivitas Padi Sawah; Produktivitas Padi Ladang; Jumlah Produksi Daging (Sapi,kambing, babi); Jumlah Produksi Daging ayam/unggas; Rasio kasus temuan bahan pangan asal hewan tidak layak konsumsi yang ditangani; Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat; Luas Lahan Perkebunan Kakao Rakyat tercapai bahkan melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan.

Indikator Produksi Padi Belum tercapai karena luas panen berkurang disebabkan menggunakan perhitungan KSA (Kerangka Sampel Area); Jumlah Anjing yang di Vaksin untuk mencegah kasus Rabies Belum tercapai karena pengadaan vaksin kurang; Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat Belum tercapai arena hanya peremajaan tanaman karet dan bukan penambahan luas tanaman karet; Luas Lahan Perkebunan Sawit Rakyat Belum tercapai karena pengadaan bibit sawit untuk perluasan tanaman sawit tidak dilaksanakan/ dibatalkan.

27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :

Tabel 38
Capaian Indikator Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase rumah tangga pengguna listrik	-					99,19				
	Rasio ketersediaan daya listrik	-					97,48%				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik tercapai
sedangkan Rasio ketersediaan daya listrik Rasio Elektrifikasi PLN.

28. Urusan Perdagangan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Perdagangan :

Tabel 39
Capaian Indikator Bidang Perdagangan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	7,12					7,00				
	Jumlah pedagang besar	48					7				
	Jumlah pedagang menengah	220					176				
	Jumlah pedagang kecil	215					165				
	Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	100%					100%				
	Rasio pasar daerah yang representatif	78					65				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

29. Urusan Perindustrian

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Perindustrian :

Tabel 40
Capaian Indikator Bidang Perindustrian
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Perindustrian	Pertumbuhan industri kecil menengah	643					663				
	Jumlah kontribusi PDRB dari sector industry (dalam juta rupiah)	130.000					126.968				
	Jumlah IKM baru	5					26				
	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	8					-				
	Jumlah IKM	643					663				
	Jumlah Tenaga Kerja Industri	1.320					1.421				
	Nilai investasi industri (Juta Rupiah)	13.500					12.920				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Pertumbuhan industri kecil menengah; Jumlah IKM; Jumlah Tenaga Kerja Industri; Jumlah IKM baru tercapai bahkan melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan.

Indikator Jumlah kontribusi PDRB dari sector industry (dalam juta rupiah) belum tercapai karena nilai produksi kecil, namun jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,57%; Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%) belum diketahui PDRB Kabupaten; Nilai investasi industri (Juta Rupiah) belum tercapai karena sektor industrinya masih berskala kecil.

30. Urusan Kelautan dan Perikanan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Kelautan dan Perikanan :

Tabel 41
Capaian Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan (Ton)	2.409,04					2.986,00				
	Konsumsi ikan (Org/Kg/Kapita)	27,5					25				
	Jumlah KUB (Kel.Usaha Bersama)	27					25				
	Jumlah kebijakan bidang IKM yang diterbitkan bidang perikanan	1					1				
	Koperasi perikanan	5					5				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Produksi perikanan (Ton); Jumlah kebijakan bidang IKM yang diterbitkan bidang perikanan ; Koperasi perikanan tercapai bahkan melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan.

Indikator Konsumsi ikan (Org/Kg/Kapita) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan ; Jumlah KUB (Kel.Usaha Bersama) ada syarat-syarat yang tidak dapat terpenuhi oleh petani/nelayan sehingga tidak isa dibentuk KUB, contoh : pembuatan AD/ART KUB.

31. Urusan Perencanaan Pembangunan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Perencanaan Pembangunan:

Tabel 42
Capaian Indikator Bidang Perencanaan Pembangunan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Perencanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dok					1 dok				
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dok					1 dok				
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 dok					1 dok				
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dok					1 dok				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Semua indikator yang telah ditetapkan di dalam RPJMD untuk Tahun 2019 telah tercapai.

32. Urusan Keuangan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Keuangan:

Tabel 43
Capaian Indikator Bidang Keuangan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP					Belum ada				

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Nilai Maturitas SPIP	3,57					3,008				
	Skor LKIP	B					CC				
	Skor EKPPD	3,87					2,9376				
	Peresentase anggaran dengan realisasi	95,20%					89,92%				
	Persentase SILPA terhadap APBD	3,33%					10,08%				
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	3,19%					11,69%				
	Persentase belanja pendidikan (20%)	22,70%					22,70%				
	Persentase belanja kesehatan (10%)	15,89%					11,45%				
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	56:43:00					56:43:00				
	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	100%					-				
	Penetapan APBD	Sesuai jadwal					Sesuai jadwal				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Masih dalam proses pemeriksaan BPK-RI; Nilai Maturitas SPIP Belum tercapai karena terdapat beberapa elemen yang tidak terpenuhi; Skor LKIP Terdapat kenaikan skor LAKIP dari tahun sebelumnya, skor Tahun 2018 C; Skor EKPPD Belum tercapai karena terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan data pendukung yang belum terpenuhi; Peresentase anggaran dengan realisasi Belum tercapai karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana,

terdapat sisa dana dari beberapa pelaksanaan kegiatan atau ada kegiatan yang gagal lelang; Persentase SILPA terhadap APBD Tercapai (Namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, terdapat sisa dana dari beberapa pelaksanaan kegiatan atau ada kegiatan yang gagal lelang); Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tercapai (Namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, terdapat sisa dana dari beberapa pelaksanaan kegiatan atau ada kegiatan yang gagal lelang).

Indikator Persentase belanja pendidikan (20%) Tercapai; Persentase belanja kesehatan (10%) Belum tercapai (tidak sesuai target tapi sudah memenuhi syarat minimal 10%); Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tercapai; Penetapan APBD tercapai.

33. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan:

Tabel 44
Capaian Indikator Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%					100%				
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	6%					14%				
	Persentase Data Kediklatan terdokumentasi dan	100%					100%				
	Terpublikasi										

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Siswa/I SMA/MA mendapatkan informasi penerimaan IPDN	100%					100%				
	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36					24				
	Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	149					136				
	Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	516					428				
	Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	1100					1.138				
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2100					1.972				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,225					-				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; Persentase Data Kediklatan terdokumentasi dan terpublikasi; Persentase Siswa/I SMA/MA mendapatkan informasi penerimaan IPDN mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.

Indikator Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Belum tercapai karena sebagian pemangku jabatan pimpinan tinggi memasuki masa pension dan masih belum ada penggantinya, dan masih belum dilaksanakannya seleksi calon JPT Pratama karena masih menunggu proses restrukturisasi organisasi (rencana perubahan perda No.3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Barito Timur); Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah Belum tercapai karena sebagai pemangku jabatan administrator memasuki masa pensiun dan masih belum ada penggantinya, dan masih menunggu proses restrukturisasi organisasi (rencana perubahan perda No.3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Barito Timur) serta menunggu proses penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrator dilingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat; Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah Belum tercapai karena sebagai pemangku jabatan pengawas memasuki masa pensiun dan masih belum ada penggantinya, dan masih menunggu proses restrukturisasi organisasi (rencana perubahan perda No.3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Barito Timur) serta menunggu proses penyederhanaan birokrasi pada jabatan pengawas dilingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Indikator Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah Tercapai; Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Belum tercapai karena adanya PNS yang mutasi keluar daerah, meninggal dan telah memasuki masa pensiun; Indeks Kepuasan Masyarakat Tidak ada data karena karena Indeks Kepuasan Masyarakat bukan termasuk dalam indikator sasaran BKPSDM Kab. Barito Timur melainkan indikator Sekretariat Daerah sebagai penjabaran visi/misi Bupati Barito Timur terlampir. Yang menjadi indikator BKPSDM adalah Indeks Profesionalitas ASN (IPN).

34. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Penelitian dan Pengembangan:

Tabel 45
Capaian Indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Penelitian dan Pengembangan	Rasio kajian litbang yang diterapkan	10%					10%				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Rasio kajian litbang yang diterapkan tercapai (Dalam 1 tahun hanya 1 penelitian/kajian yaitu Kajian Produk Unggulan Daerah Kab. Barito Timur 2019).

35. Urusan Pengawasan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Pengawasan:

Tabel 46
Capaian Indikator Bidang Pengawasan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	75%					69,23%				
	Jumlah Temuan hasil pemeriksaan APIP Kabupaten	30					65				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Persentase tindak lanjut temuan Belum tercapai karena hasil pemeriksaan APIP yang sudah di tindak lanjut yaitu pemeriksaan Reguler (10 Desa), Reutu (20 LHR), dan Riksus (15 LHR). Sedang pemeriksaan Reguler 20 Desa masih dalam proses

tindak lanjut Desa ke Inspektorat Kab. Bartim; Jumlah Temuan hasil pemeriksaan APIP Kabupaten Tercapai.

36. Urusan Sekretariat Dewan

Berikut ini capaian indikator urusan bidang Sekretariat Dewan:

Tabel 47
Capaian Indikator Bidang Sekretariat Dewan
Tahun 2018-2023

FOKUS	INDIKATOR	Target Capaian Indikator Kinerja					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Sekretariat Dewan	Jumlah perda inisitaif DPRD yang ditetapkan	2					1				

Sumber: KPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Indikator Jumlah perda inisitaif DPRD yang ditetapkan Belum tercapai karena perda yang satunya lagi belum dilaksanakan dengan alasan menyesuaikan kondisi di SOPD.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Barito Timur yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

2.3.1.1. Masalah Pengembangan Perekonomian Daerah

Pembangunan di bidang ekonomi nampaknya selalu menjadi isu utama dalam perencanaan pembangunan, tidak terkecuali di Barito Timur. Perekonomian memegang peran yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, sebab ekonomi yang kuat akan bermuara pada masyarakat yang sejahtera. Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Dimana, Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan dan peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal dan yang kedua belum meratanya pendapatan masyarakat. Permasalahan dalam bidang ekonomi untuk perekonomian berbasis kerakyatan belum berkembang secara optimal antara lain menyangkut maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan. Permasalahan dalam bidang ekonomi untuk belum meratanya pendapatan masyarakat anatara lain tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, dan investasi, dengan uraian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya mutu hasil dan produktivitas sektor pertanian. Masih rendahnya kemampuan petani dalam mengolah hasil pertanian, belum adanya alat-alat pertanian yang belum memadai, masih rendahnya kemampuan akses

petani terhadap pupuk dan bibit unggul dan belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

2. Masih rendahnya produktivitas sektor perikanan. Masih rendahnya tingkat produksi perikanan, masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan, masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat, petani pembudidaya dan nelayan. perkebunan, peternakan, perikanan. Budidaya perikanan air tawar perlu diusahakan dengan lebih baik mengingat semakin turunnya hasil tangkapan. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan harus terus dilakukan dengan berbagai program yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan hendaknya dapat diterapkan untuk peningkatan produktivitas dimaksud. Sejak sekarang perlu dipikirkan secara seksama bagaimana menjamin bahwa apabila nantinya telah terjadi peningkatan produksi, ada jaminan bahwa produk tersebut dapat diserap oleh pasar dan menguntungkan para petani pembudidaya dan nelayan.
3. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Barito Timur. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya objek wisata yang memadai, kurang maksimalnya aksesibilitas ke objek wisata, kurang optimalnya sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan antara pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan para pelaku usaha pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana di destinasi wisata, kurang optimalnya informasi dan promosi potensi pariwisata Kabupaten Barito Timur dan kurang

optimalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepariwisataan.

4. Belum optimalnya peranan koperasi dan UMKM dalam perekonomian kerakyatan. Adapun permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal berikut, masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat, belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dan sehat, masih rendahnya pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik, jiwa dan keinginan untuk berwiraswasta yang rendah terutama dikalangan penduduk asli dan masih terbatasnya akses masyarakat dalam menjual hasil usahanya.
5. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil menengah. Disebabkan karena belum maksimalnya inovasi produk hasil industri, akses pemasaran hasil industri masih terbatas dan hasil industri belum berkualitas ekspor.
6. Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan. Disebabkan karena akses masyarakat terhadap pasar di daerah terpencil masih sulit, daya beli masyarakat masih rendah dan jumlah pedagang masih rendah.
7. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS. Disebabkan karena belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS, masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum, belum adanya wadah sarana pembinaan, pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan dan belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA.
8. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran. Disebabkan karena masih kurangnya kompetensi

dan produktivitas tenaga kerja, belum optimalnya perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja, belum terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan jaminan sosial tenaga kerja serta belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan.

9. Masih rendahnya iklim investasi. Disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, belum optimalnya proses perijinan usaha dan belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dalam investasi berusaha.

2.3.1.2. Masalah Infrastruktur Dasar

Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui pada infrastruktur dasar yaitu belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah perlistrikan, sarana komunikasi dan sarana perhubungan. terkait masalah infrastruktur dasar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil karena meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat, belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu belum optimalnya kesesuaian penataan ruang dengan RTRW yang disebabkan oleh adanya kecenderungan ketidakserasian pemanfaatan tata ruang dan ketertiban dalam penggunaan tanah, masih rendahnya pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan serta proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota belum ditentukan.

2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman. Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya kualitas infrastruktur adalah sebagai berikut masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan, masih adanya permukiman kumuh baik perdesaan maupun perkotaan, belum optimalnya jaringan listrik dan komunikasi di perdesaan, dan belum adanya sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, pengolahan, pembuangan (disposal), dan sistem pakai ulang (reuse).
3. Mobilitas barang dan orang belum menjangkau daerah terpencil. Hal tersebut disebabkan oleh sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai, kesenjangan pelayanan jaringan transportasi anatara kawasan kota dan pedesaan, masih kurang dan belum meratanya fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan baik jalan maupun sungai keseluruh wilayah Kabupaten Barito Timur dan belum terlaksananya dengan maksimal pengawasan, pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan dan sungai.
4. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Di sebabkan oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya fungsi pengawasan dan penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan, belum adanya upaya melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatnya ancaman terhadap pengrusakan terhadap kawasan lindung, areal hutan tropis, dan daerah resapan air, menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan serta ancaman pencemaran lingkungan yang semakin tinggi, pengelolaan sampah

belum efektif dan efisien, meluasnya wilayah yang mengalami kerusakan ekosistem serta beberapa perusahaan yang sudah beroperasi tetapi belum mengantongi AMDAL.

2.3.1.3. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di berbagai sektor pembangunan daerah. Kehidupan manusia yang berkualitas dapat diartikan manusia yang memiliki cara hidup, cara berpikir, kemampuan, iman dan watak tertentu yang menunjukkan keunggulan diri dan dapat berguna bagi orang lain. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (*attitude*) yang baik. Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing sumber daya manusia antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan, dan masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas dan fasilitas pendidikan dasar, masih rendahnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan serta masih rendahnya tingkat kepercayaan

orang tua akan pendidikan di Barito Timur sehingga cenderung menyekolahkan anaknya keluar daerah.

2. Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap kesehatan bagi masyarakat. Disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih belum memadai sarana dan prasarana penunjang kesehatan, distribusi tenaga kesehatan masih belum merata ke berbagai wilayah, masih rendahnya pelayanan pertolongan persalinan serta proses pengadaan obat-obatan terkendala kebijakan.
3. Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disebabkan karena belum ada terbentuknya forum anak tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dan masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan.

2.3.1.4. Masalah Keragaman Budaya

Perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi. Semua unsur perbedaan ini harus dipelajari dan dimengerti agar tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya adalah nilai leluhur yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Ketentraman dan keamanan merupakan salah satu aspek yang harus didapatkan oleh setiap warga masyarakat. Dengan ketentraman dan keamanan maka hidup masyarakat akan lebih tenang dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Adapun hal-hal yang menyebabkan masalah keragaman budaya adalah masih rendahnya upaya

pelestarian budaya tradisional dan masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional, masih kurangnya atraksi budaya daerah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya tradisional, masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang komplek situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya serta belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma'anyan lawangan.
2. Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan, masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, masih rendahnya prestasi pemuda olahraga, belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan serta masih adanya konflik horisontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja.

2.3.1.5. Masalah Birokrasi

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama dari suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan

dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat berlangsungnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Permasalahan utama dari birokrasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya inisiasi bersama dan implementasi pada strategi yang dibuat antar pihak, dapat menciptakan efektivitas implementasi strategi yang dapat menghadapi tuntutan perubahan yang ada sehingga harus terus membuat terobosan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan minimal, sarana dan prasarana pengaduan masyarakat belum optimal.
2. Belum sepenuhnya terlaksana birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah, masih belum efektifnya kelembagaan birokrasi pemerintah, belum meratanya pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkat desa, rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transparansi administrasi, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum optimal serta masih belum seluruh masyarakat tertib administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya pengembangan kinerja aparatur sipil negara. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut

manajemen aparatur masih belum optimal, masih belum efektif pembinaan dan penegakan disiplin aparatur serta belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SOPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

1. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan

Sektor pertanian merupakan salah satu variabel penting bagi perkembangan masa depan Barito Timur. Hal ini dikarenakan peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB cukup besar, di sisi lain, sektor pertambangan bukan menjadi prioritas ekonomi Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan besaran kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga konstan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan Kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Selain itu, pentingnya perhatian dan fokus pembangunan di sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang miskin bekerja di sektor ini.

2. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pendidikan digunakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat. Dengan dan lewat pendidikan diharapkan akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.

Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

3 Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan dorongan yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat berfungsi. Dengan aset Infrastruktur yang baik, akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Barito Timur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

4. Pengentasan Kemiskinan

1. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi

pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, penanggulangan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan politis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat.

5 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Kabupaten Barito Timur dikatakan belum melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Namun upaya untuk mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) penting untuk menghidupkan semangat kompetisi antar unit kerja pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Inisiatif ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan

kepedulian masyarakat luas terhadap perkembangan reformasi birokrasi, namun penting diperhatikan bahwa status ini seharusnya tidak bersifat statis dan merupakan upaya konkret dalam perubahan ke arah yang lebih terlembaga dan berkesinambungan.

6 Pelestarian Lingkungan Hidup

Sumber daya alam ada batasan dan sifat bawaan, jika alam dieksploitasi tanpa aturan akan menimbulkan bencana bagi seluruh lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya peningkatan aktivitas perekonomian dengan kualitas lingkungan hidup akan memicu beberapa persoalan seperti bencana alam berupa kebakaran hutan/lahan, banjir, hingga perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu isu internasional.

Masyarakat harus mendapatkan jaminan lingkungan sehat, oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan salah satunya tambang. Serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk menjadi tempat hidup bagi manusia, fauna dan flora serta ekosistem lainnya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan

lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hail alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

7. Pengembangan dan Pelestarian Budaya lokal Daerah

Pembangunan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak hanya terbatas pada fisik sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya, pendidikan saja, namun juga mencakup pada pembangunan diri masyarakatnya, religius, dan adat istiadatnya. Masyarakat Barito Timur sebagian besar merupakan tumpuk dayak Ma'anyan (sebenarnya bukan hanya Ma'anyan namun juga Lawangan). Pada saat ini, masyarakat Barito Timur menjadi sebuah daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ada banyak suku-suku diluar Ma'anyan dan Lawangan yang datang dan tinggal di daerah ini, seperti Ngaju, Batak, Jawa, dan lainnya. Kekayaan budaya lokal daerah ini perlu untuk terus dikembangkan agar menjadi salah satu asset budaya yang menjadi daya tarik wisata daerah dan diintegrasikan dengan potensi pariwisata yang ada. Eksotika dan kekhasan budaya di kabupaten Barito Timur bisa kita jumpai pada upacara-upacara atau ritual kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ma'anyan. Beberapa ritual kematian yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat yaitu Ijambe, Ngadatun, Mia, Ngatang, Siwah, isi dari berbagai upacara kematian biasanya berupa pertunjukan berbagai kesenian atau tari-tarian tradisional Dayak Ma'anyan seperti Gintur, Giring-Giring, Dasas, Ebu Lele, dan sebagainya, sehingga para pengunjung bebas untuk

menikmati kebudayaan lokal daerah. Hal ini menjadi keasyikan tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengeksplorasi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Pada momen-momen ini pemerintah daerah harus lebih responsif dengan meningkatkan promosi potensi wisata dan budaya sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung dan berwisata di Kabupaten Barito Timur.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2020, proyeksi Tahun 2021 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2021. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2020 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuan dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan untuk tahun berkenaan; sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Di sini, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stakeholder* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan

pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (pembangunan nasional).

Analisis ekonomi makro daerah akan menjadi penunjang dalam mengkaji dan mengevaluasi kondisi perekonomian Kabupaten Barito Timur. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar dalam memproyeksikan kondisi perekonomian Tahun 2021 untuk memberikan gambaran awal pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait perekonomian mikro yang merupakan *basic* dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan Tahun 2021 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.

Kabupaten Barito Timur memiliki berbagai macam potensi unggulan daerah antara lain dari sektor pertanian, perkebunan sawit dan karet. Sektor kehutanan dalam bentuk produk hasil hutan. Sektor perikanan berupa ikan air tawar dari hasil perikanan tangkap, kolam dan keramba. Sektor peternakan berupa sapi, babi, kambing dan ayam. Sektor pertambangan berupa bahan galian dan batu bara. Sektor pariwisata berupa kebudayaan daerah, cagar wisata (anggrek alam, goa, air terjun dan danau) dan cagar budaya. Apabila semuanya atau sebagian dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar

pendapatan masyarakat naik disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program pembangunan daerah. Se jauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan “besaran anggaran” yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya.

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang diambil haruslah melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Salah satu kajian utama dalam melihat fenomena perekonomian daerah adalah analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun analisis stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok melalui indikator laju inflasi. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis PDRB harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB maupun indikator turunannya seperti laju pertumbuhan ekonomi maupun struktur perekonomian wilayah, sedangkan perekonomian mikro dapat

diindikasikan melalui kestabilan harga kebutuhan hidup masyarakat di setiap bulannya.

Struktur perekonomian dapat menggambarkan berapa besar peran masing-masing sektor pembentuk produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam perekonomian suatu daerah. Struktur ekonomi daerah dapat di jadikan sebagai dasar analisa maupun pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan perekonomian. Struktur ekonomi ini dapat dilihat dari besarnya distribusi persentase nilai tambah masing – masing sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah termasuk dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan asumsi perencanaan pembangunan daerah.

PDRB menurut lapangan usaha diklasifikasikan menjadi 17 lapangan usaha dan dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

PDRB Barito Timur atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai 6.318,3 Miliar rupiah yang merupakan total Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dibentuk oleh seluruh lapangan usaha di Barito Timur sedangkan untuk Tahun 2018 mencapai 7.043,1 Miliar rupiah. Sementara PDRB yang dinilai dengan harga konstan 2010 Kabupaten Barito Timur menurut pengeluaran untuk Tahun 2017 sebesar mencapai 4.779,59 Miliar rupiah sedangkan untuk Tahun 2018 sebesar 5.054,20 Miliar rupiah.

Struktur perekonomian Barito Timur didominasi oleh tiga kategori, yaitu kategori pertambangan dan penggalian; kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; serta kategori konstruksi. Ketiga kategori ini memberikan kontribusi sebesar 63,57 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur Tahun 2017, sedangkan untuk Tahun 2018 kategori pertambangan dan penggalian; kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; serta kategori konstruksi. Ketiga kategori ini memberikan kontribusi sebesar 62,96. Kontribusi kategori pertambangan dan penggalian merupakan yang terbesar yakni 37,69 persen; kemudian diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,37 persen; serta konstruksi sebesar 7,90 persen. Sementara 14 kategori lainnya berkontribusi dibawah 7,99 persen terhadap total PDRB Barito Timur.

Berdasarkan angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2017 adalah sebesar 5,98 persen sedangkan untuk Tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur sebesar 5,75 persen. Menurut lapangan usaha pembentuknya, terdapat 13 kategori yang memiliki laju pertumbuhan di atas pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2018. kategori-kategori tersebut adalah kategori jasa keuangan dan asuransi (8,20 persen); jasa pendidikan (8,12 persen); informasi dan komunikasi (8,42 persen); industri pengolahan (5,66 persen); transportasi dan pergudangan (8,00 persen); penyediaan akomodasi dan makan

minum (8,13 persen); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,91 persen); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (7,84 persen); perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (8,17 persen); konstruksi (3,00 persen); jasa lainnya (6,93 persen); serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (7,21 persen). Sementara untuk kategori jasa perusahaan; pengadaan listrik dan gas; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan pertambangan penggalan memiliki laju pertumbuhan dibawah 8,42 persen.

Proyeksi makro ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2019-2020 akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut yaitu : menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan harga pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, percepatan pengurangan kemiskinan, menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian inflasi dan perluasan serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Barito Timur masih bertumpu pada sektor primer yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keseluruhan PDRB Barito Timur, kemudian diikuti oleh sektor tersier dan sekunder. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan angka sangat sementara pada Tahun 2018 Kabupaten Barito Timur berada di urutan ke-12 dengan nilai sebesar 5,75 persen. Angka tersebut masih di atas angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 5,64 persen. Posisi laju pertumbuhan riil Kabupaten Barito Timur tepat berada di bawah Kabupaten Gunung Mas dengan laju pertumbuhan 6,91 persen, dan di atas Kabupaten Murung Raya dengan laju pertumbuhan 5,61 persen dan Kota Palangka Raya dengan laju pertumbuhan sebesar 7,12 persen.

3.1.1 Arah Kebijakan Nasional

Tema RKP Nasional Tahun 2021 “ **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial** ”. Sesuai dengan tema RKP Nasional Tahun 2021 dijabarkan kedalam prioritas nasional yaitu :

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi
2. Reformasi sistem kesehatan nasional
3. Reformasi perlindungan sosial
4. Reformasi sistem ketahanan bencana

3.1.2 Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yaitu “**Pengembangan Agroindustri berbasis Teknologi Ramah Lingkungan**”.

Isu strategis pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2021 :

1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, Pengelolaan SDA dan LH dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
2. Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing
3. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah
4. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
6. Penggalan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi
7. Pemerataan kesejahteraan masyarakat
8. Mewujudkan *good governance* secara menyeluruh

3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pada Tahun 2021, pembangunan di Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan Tahun 2020. Pada

Tahun 2021 pembangunan Kabupaten Barito Timur mulai fokus pada pemantapan infrastuktur daerah khususnya infrastruktur dasar di Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2021 adalah **“PEMBANGUNAN BARITO TIMUR YANG MAJU DAN UNGGUL”** Melalui tema di atas, pembangunan Kabupaten Barito Timur menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan peningkatan perekonomian masyarakat berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Barito Timur memiliki infrastruktur yang memadai dan memiliki SDM yang berkualitas dan mumpuni untuk mendukung pembangunan. Untuk mencapai Pembangunan Barito Timur yang Maju dan Unggul yaitu Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa; Peningkatan produktivitas sektor perikanan; Pengembangan kawasan industri potensial; Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/kelurahan; Peningkatan pengelolaan daerah/obyek pariwisata; Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan; Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat; Peningkatan peranan koperasi dalam mendukung usaha masyarakat; Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat; Optimalisasi akses permodalan bagi wirausaha; Peningkatan daya tarik investasi daerah; Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha; Peningkatan literasi dan penuntasan buta aksara pendidikan umum; Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik; Peningkatan kualitas tenaga kesehatan; Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; Pembangunan infrastruktur dasar; Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan; Pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan yang sehat; Peningkatan pengembangan rumah layak huni; Peningkatan jaringan listrik dan komunikasi terutama dipedesaan; Peningkatan

sarana dan prasarana perhubungan; Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan; Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup; Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang representatif; Peningkatan promosi penyelenggaraan budaya tradisional daerah.

Kemampuan keuangan daerah dari sisi APBD, yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun relatif terus meningkat. Peningkatan ini dikarenakan menyesuaikan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun strategi dan upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Percepatan pengembangan iklim investasi daerah dan pengurangan pengangguran.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar daerah.
5. Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan.
6. Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan

keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Dasar yang melatar belakangi kebijakan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan Keuangan Daerah memuat beberapa hal yang mencakup, 1) Perencanaan dan Penganggaran; 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

3.2.1.1 Prakiraan Target Pendapatan Daerah Tahun 2021

Target pendapatan daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.025.191.307.119 yang terdiri dari pendapatan asli daerah yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 88.437.482.415 untuk Tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.2.570.885.500 menjadi Rp. 91.008.367.915. Pendapatan Transfer pada tahun sebelumnya sebesar Rp.760.721.936.945 pada Tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 74.691.713.259 menjadi Rp.835.413.650.204 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar pada tahun sebelumnya Rp.101.429.629.000 turun sebesar Rp.2.660.340.000 menjadi Rp.98.769.289.000. Menurut sumber-sumber pendapatan dirincikan menjadi:

a. pendapatan asli daerah:

Pendapatan asli daerah daerah diperoleh dari:

1. Pajak Daerah Tahun 2021 diproyeksikan Rp. 40.428.150.000 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.5.919.850.
2. Retribusi Daerah Tahun 2021 diproyeksikan Rp.13.560.445.500 meningkat sebesar Rp. 3.638.035.500 dari tahun sebelumnya.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.8.629.483.615 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.8.629.483.615.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.28.390.288.800 turun sebesar Rp. 6.987.000.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 35.377.288.800.

b. Pendapatan Transfer:

Adapun rincian dari setiap komponen Dana Perimbangan dan proyeksinya pada tahun 2021 terurai sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.806.163.069.011 meningkat sebesar Rp. 73.370.257.011 dari tahun sebelumnya.
2. Transfer Antar Daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.29.250.581.193 meningkat sebesar Rp. 1.321.456.248 dari tahun sebelumnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

rincian dari setiap komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan proyeksinya pada tahun 2021 terurai sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.14.828.625.000 naik sebesar Rp. 706.125.000 dari tahun sebelumnya.
2. Pendapatan Lainnya Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 83.940.664.000 turun sebesar Rp. 3.366.465.000 dari tahun sebelumnya.

3.2.1.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021

Kebijakan belanja terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Alokasi belanja ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.049.746.436.009 atau meningkat sebesar Rp. 76.054.299.589 dari tahun 2020 sebesar Rp.973.692.136.420.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi berorientasi kepada upaya pemenuhan kebutuhan rutin perangkat daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk penyediaan dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai petunjuk dan kebijakan Pemerintah Pusat termasuk pembayaran gaji ke-13 untuk Tahun Anggaran 2021. Selain hal tersebut di atas, alokasi belanja operasi ini juga untuk mengakomodir belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

Pada tahun Anggaran 2021 Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp.711.432.321.340. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp.670.137.894.691 mengalami kenaikan sebesar Rp. 41.294.426.649.

Adapun rincian setiap komponen pembentuk belanja operasi dan proyeksinya pada tahun 2021 terurai sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.498.334.691.860 bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar Rp.448.514.558.513 mengalami peningkatan sebesar Rp.49.820.133.347.

2. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.184.997.629.480 bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar Rp.203.200.436.178 turun sebesar Rp.18.202.806.698.
3. Belanja Subsidi Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.600.000.000,00 tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2020.
4. Belanja Hibah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.25.000.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.677.100.000 dibanding tahun 2020 sebesar Rp.15.322.900.000.
5. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.2.500.000.000,00 tidak mengalami peningkatan dibanding Tahun 2020.

b. Belanja Modal

Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.174.292.709.040 mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.662.402.911 dibanding tahun 2020 sebesar Rp.134.630.306.129.

c. Belanja Tidak Terduga

Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.2.000.000.000 tidak mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000.

d. Belanja Transfer

Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.162.021.405.629 turun sebesar Rp. 4.902.529.971 dibanding tahun 2020 sebesar Rp.166.923.935.600.

3.2.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Proyeksi anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2020.

a. Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 ini dialokasikan sebesar Rp. 39.555.128.890 meningkat sebesar Rp.6.452.040.830 dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp.33.103.088.060. Adapun rincian dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan proyeksinya pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan Rp.30.555.128.890 meningkat sebesar Rp.6.452.040.830 dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp.33.103.088.060.
2. Pencairan Dana Cadangan tidak dialokasikan atau Rp. 0, sama seperti tahun 2021 Rp. 0.
3. Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah tidak terproyeksikan.

b. Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari tahun 2020. Adapun rincian dari komponen Pengeluaran Pembiayaan dan proyeksinya pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a) Pembentukan dana cadangan tidak diproyeksikan/direncanakan .
- b) Penyertaan Modal (Investasi) daerah tidak diproyeksikan/direncanakan diproyeksikan Rp.15.000.000.000 meningkat sebesar Rp.5.000.000.000 dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000.

- c) Pembayaran Pokok Utang tidak diproyeksikan/direncanakan.
- d) Pembiayaan Pinjaman Daerah tidak diproyeksikan/direncanakan.
- e) Pembiayaan Neto diproyeksikan Rp.24.555.128.890 meningkat sebesar Rp.1.452.040.830 dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 23.103.088.060.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan skala prioritas pembangunan daerah seperti yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur 2018-2023 menetapkan visi yang ingin di capai, yaitu **“Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah”**.

Makna dari visi tersebut adalah :

1. **Sehat** adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas secara produktif baik ekonomi maupun sosial.
2. **Cerdas** adalah kemampuan untuk belajar dengan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya.
3. **Sejahtera** adalah keadaan atau kondisi masyarakat yang baik, dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dapat diartikan juga terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.

4. **Pemerintahan yang Amanah** adalah pemerintah yang mampu memberikan pelayanan dengan maksimal dan sebesar-besarnya prioritas pembangunan untuk kemakmuran dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **Misi pertama** : Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan.

Peningkatan ekonomi kerakyatan Kabupaten Barito Timur dikembangkan melalui kearifan lokal masyarakat dengan memerhatikan kemampuan dan tradisi masyarakat yang baik sehingga jumlah strategi dan arah kebijakan meliputi penelitian dan pengembangan teknologi, inovasi teknologi tepat guna, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kerakyatan serta penyediaan alat-alat pertanian, peternakan dan perkebunan dapat terselenggara dengan baik.

2. **Misi kedua** : Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan yang dikembangkan melalui kesehatan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur diperlukan sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menunjang kinerja. Dalam upaya meningkatkan penataan kesehatan masyarakat perlu strategi dan arah kebijakan yaitu dengan meningkatkan kapasitas kinerja tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga medis dan paramedis, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kesehatan, perbaikan

standarisasi pelayanan kesehatan, penyediaan puskesmas rawat inap, puskesmas dan polindes.

3. **Misi ketiga** : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Ketersediaan infrastruktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan sekaligus menjadi prasyarat dasar bagi pengembangan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, sumber daya air, air bersih maupun kelistrikan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur.

4. **Misi keempat** : Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olah raga.

Pembinaan Umat beragama merupakan suatu kewajiban di wilayah Republik Indonesia, terlebih di wilayah Kabupaten Barito Timur yang memiliki keberagaman sehingga tercipta kondisi yang kondusif. Dengan, terpeliharanya kebudayaan di wilayah Barito Timur, budaya leluhur tetap lestari dan dapat dikembangkan menjadi objek-objek wisata kebudayaan. Pembinaan pemuda dan olah raga menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menghasilkan pemuda yang berprestasi dan olahragawan handal.

5. **Misi kelima** : Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang baik dengan memberikan penghargaan kepada aparatur yang berprestasi, memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, penyediaan fasilitas kerja dengan perangkat kerja yang memadai, optimalisasi analisis jabatan dengan penempatan aparatur, perencanaan dan informasi,

menyediakan fasilitas teknologi informasi, penerapan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat, jelas dan terukur, penguatan regulasi kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemerintah daerah.

4.1 Tujuan dan sasaran pembangunan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2018 – 2023 berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Sasaran-sasaran pokok pembangunan terdiri dari :

1. Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
3. Terwujudnya Prasarana Dan Sarana Dasar Yang Memadai
4. Terwujudnya Kondisi Sosial Budaya, Politik, Hukum, Keamanan Dan Ketertiban Yang Kondusif
5. Terwujudnya Pembangunan Barito Timur yang Berkelanjutan
6. Terwujud Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Barito Timur

Visi Provinsi Kalimantan Tengah	Visi Kabupaten Barito Timur	Misi Provinsi Kalimantan Tengah	Misi kabupaten Barito Timur	Tujuan Provinsi Kalimantan Tengah	Tujuan Kabupaten Barito Timur	Sasaran Kabupaten Barito Timur	Indikator sasaran
Kalimantan tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis)	Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahannya yang Amanah	Pemantapan tata ruang wilayah provinsi	Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan.	Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah	LPE sektor pertanian LPE sektor industri pengolahan

				Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas		Meningkatkan daya Tarik pariwisata daerah	PDRB sektor pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan
				Meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir dan pantai		Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita
				Meningkatkan daya saing ekonomi daerah		Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran	Nilai investasi berskala nasional (PMDN) Nilai investasi berskala nasional (PMA) Tingkat pengangguran terbuka
		Pengelolaan infrastruktur	Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan,	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan pemerataan	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah

			pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.	rencana konsisten	kualitas daya saing SDM		
				Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baru		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
				Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan gender (IDG)
		Pengelolaan Sumber daya air, pesisir dan pantai.	Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air	Meningkatkan peran sektor pariwisata	Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	- Persentase panjang jalan kondisi baik - Persentase RT yang terakses air bersih

			bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.		merata dan berkelanjutan		- Persentase luas kawasan (perumahan) kumuh (%) - Rasio elektifikasi (rumah tangga pengguna listrik) (%)
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	- Persentase jumlah sampah yang tertangani - Status indeks kualitas air - Status indeks kualitas udara - Tutupan lahan
		Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan	Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olah raga.	Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	Terwujudnya masyarakat yang beragam dan berbudaya	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	- Persentase konflik yang diselesaikan (jumlah tindak pidana)
		Pemantapan tata kelola pemerintah daerah	Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien,		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	- Persentase wirausaha baru

			transparan, dan bertanggung jawab.		yang baik dan bersih		
		Peningkatan pendidikan, kesehatan dan pariwisata.				Meningkatkan prestasi olah raga	Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi
		Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam				Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya
		Pengelolaan Pendapatan daerah				Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Predikat akuntabilitas kinerja
						Terwujudnya pemerintahan	Jumlah kasus korupsi

						yang bersih dan bebas KKN	
						Meningkatnya pelayanan public yang berkualitas dan terpadu	Nilai IKM (nilai interval)

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis yang melandasi atau berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih dari tahun ke tahun. Untuk itu, prioritas pembangunan terhubung dan merupakan arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dan harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan nasional yang termuat di dalam RPJMN 2020-2024 meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Prioritas pembangunan Provinsi sebagaimana dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 meliputi :

1. Pemerataan infrastruktur wilayah
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai
3. Stabilitas ekonomi daerah
4. Peningkatan pendapatan masyarakat
5. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
6. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
7. Pengelolaan industri pariwisata
8. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
9. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Isu strategis pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2021 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja Berdaya Saing
2. Pengembangan Green Economy dan Green Government dalam Realisasi Pembangunan Daerah
3. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
4. Restrukturisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan aksesibilitas Wilayah
6. Penggalan Potensi Sumber Daya Alam melalui Optimalisasi Investasi
7. Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2020 sesuai RPJMD 2016-2021

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai
3. Stabilitas Ekonomi Daerah
4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
5. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas
7. Pengelolaan Industri Pariwisata
8. Pengelolaan SDA secara Bijaksana yang Berkelanjutan
9. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur

RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Daya saing perekonomian Kabupaten Barito Timur semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparaturnya penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi darat terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial

dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dalam penetapan prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur untuk kurun waktu Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJP-D Kabupaten Barito Timur Tahap III Tahun 2018 - 2023, adalah sebagai berikut :

1. Daya saing perekonomian Kabupaten Barito Timur semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
2. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung

oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi darat terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

4.3. Inovasi Daerah

Pemerintah daerah sekarang di tuntut untuk bisa lebih kreatif dengan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru untuk lebih meningkatkan potensi daerah dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang mana nantinya hasilnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Bappeda Kabupaten Barito Timur telah membuat satu inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan untuk dapat mengunci semua program kegiatan di RPJMD, Renstra, dan Renja sehingga OPD tidak dapat membuat kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan di RPJMD dan Renstra di harapkan nantinya semua dokumen perencanaan yang di mulai dari RPJMD, Renstra, dan Renja akan sinkron, dan sampai ke penganggaran diharapkan akan sinkron dengan dokumen yang telah dibuat dari awal tidak ada perbedaan antar satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Inovasi daerah tersebut sudah masuk ke dalam kegiatan di Bappeda yaitu program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan implementasi Simda Perencanaan BPKP.

4.4. Program dan kegiatan yang mendukung program provinsi dan program nasional

Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga ikut mendukung program provinsi dan program nasional yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi

NO	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	16.710.249.360,00		
	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.710.249.360,00		16.710.249.360,00
	- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	574.830.000		

	-	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			
	-	Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	5.170.710.110,00		
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	6.092.856.000,00		
	-	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan perairan lainnya	4.297.023.250,00		
	-	Peningkatan Jalan dan Jembatan	574.830.000		
	b.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.340.133.500,00		
	-	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	2.340.133.500,00		
2		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai	37.259.530.023,00		
	a.	Dinas Sosial	903.435.000,00		903.435.000,00
	-	Program bantuan dan jaminan kesejahteraan social	700.000.000,00		
	-	Program peningkatan pemberdayaan sosial	203.435.000,00		
	b.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	1.434.203.500,00		1.434.203.500,00
	-	Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	298.845.000,00		
	-	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	867.285.500,00		
	-	Program peningkatan akses usaha bagi UMK dan koperasi kepada sumber daya produktif	42.000.000,00		
	-	Program pengembangan industri kecil dan menengah	226.073.000,00		
	c.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	846.393.114,00		846.393.114,00

	-	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	160.178.920,00		
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	400.835.274,00		
	-	Program peningkatan masyarakat dalam membangun desa	285.378.920,00		
	d.	Dinas Pertanian	29.326.191.672,00		29.326.191.672,00
	-	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	9.085.907.480,00		
	-	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	570.658.350,00		
	-	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	291.295.000,00		
	-	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5.391.183.468,00		
	-	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	190.491.300,00		
	-	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4.298.042.600,00		
	e.	Dinas Perikanan	4.749.306.737,00		4.749.306.737,00
	-	Program pengembangan budidaya perikanan	2.876.330.000,00		
	-	Program pengembangan perikanan tangkap	1.872.976.737,00		
3		Stabilitas Ekonomi Daerah	2.085.899.221,00		
	a.	Dinas Perdagangan	1.955.069.221,00		1.955.069.221,00
	-	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.456.654.221,00		
	-	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	498.415.000,00		
	b.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.830.000,00		
	-	Program Perlindungan Dunia Kewirausahaan	65.570.000,00		

		Usaha Kecil dan Menengah			
	-	Program Pengendalian Penanaman Modal	65.260.000,00		
4		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	25.517.807.004,50		
	a.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	940.922.069,50		940.922.069,50
	-	Program Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan	940.922.069,50		
	b.	Dinas Pertanian	19.827.578.198,00		
	-	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	9.085.907.480,00		
	-	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	570.658.350,00		
	-	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	291.295.000,00		
	-	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5.391.183.468,00		
	-	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	190.491.300,00		
	-	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4.298.042.600,00		
	c.	Dinas Perikanan	4.749.306.737,00		
	-	Program pengembangan budidaya perikanan	2.876.330.000,00		
	-	Program pengembangan perikanan tangkap	1.872.976.737,00		
5		Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	18.974.214.355,20		
	a.	Dinas Pendidikan	17.237.214.355,20		17.237.214.355,20
	-	Program Pendidikan Anak Usia Dini	432.646.800,00		
	-	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	13.566.778.555,20		
	-	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	1.706.196.000,00		

	-	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.531.593.000,00		
	b.	Dinas Kesehatan	1.737.000.000,00		1.737.000.000,00
	-	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	270.000.000,00		
	-	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	247.000.000,00		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.140.000.000,00		
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	80.000.000,00		
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	120.000.000,00		
6		Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	40.988.571.303		
	a.	Dinas Pendidikan	1.531.593.000		1.531.593.000
	-	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	1.531.593.000		
	b.	Dinas Kesehatan	39.456.978.303		39.456.978.303
	-	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	39.456.978.303		
7		Pengelolaan Industri Pariwisata	1.692.108.000,00		
	a.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga	1.692.108.000,00		1.692.108.000,00
	-	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	50.000.000,00		
	-	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	1.642.108.000,00		
8		Pengelolaan SDA Secara Bijaksana yang Berkelanjutan	318.197.635,25		
	a.	Sekretariat Daerah	242.760.000,00		242.760.000,00
	-	Program Pengendalian SDA dan Kehutanan	242.760.000		

	b.	Dinas Lingkungan Hidup	75.437.635,25		
	-	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	54.437.635,25		
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	21.000.000,00		
9		Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	1.100.861.165,00		
	a.	Dinas Pendapatan Daerah	1.100.861.165,00		1.100.861.165,00
	-	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.100.861.165		

Tabel 4.4.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam Rancangan peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembangunan Nasional

No	Bidang Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Pendidikan, meliputi Urusan Pemerintahan Daerah	- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Program Pendidikan Masyarakat		1.531.593.000,00 80.007.600,00 255.067.500,00		
2	Kesehatan, meliputi Urusan Pemerintahan Daerah	- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Pengembangan Lingkungan Sehat		90.000.000,00 270.000.000,00 247.000.000,00		

3	Perumahan dan Permukiman, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	-	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		1.140.000.000,00		
		-	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		80.000.000,00		
		-	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		120.000.000,00		
		-	Program Pengembangan Perumahan		3.340.454.360,37		
		-	Program Kebersihan Kawasan Perkotaan		1.119.549.199,00		
		-	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh		292.660.400,00		
		-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		5.715.031.217,00		
		-	Program Pengembangan Kawasan Permukiman		2.340.133.500,00		
		-	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limah		4.695.369.000,00		
		-	Program Pengendalian Banjir		2.547.126.750,00		
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, meliputi: urusan pemerintahan daerah	-	Program Pengendalian Penanaman Modal		65.260.000,00		
		-	Program Pengembangan Iklim Investasi		45.000.000,00		

5	Ketahanan Energi, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	-	Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Usaha		28.000.000,00		
		-	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		2.876.330.000,00		
		-	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		1.872.976.737,00		
		-	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan		5.391.183.468,00		
		-	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		4.298.042.600,00		
		-	Program Pengembangan Pasar Daerah		3.023.657.000,00		
		-	Program Peningkatan Iklim Usaha dan Kapasitas Berusaha		16.500.000,00		
		-	Program Pengawasan, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		168.000.000,00		
		-	Program Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan		940.922.069,50		
		-	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		178.652.599,50		
		-	Program Transmigrasi		171.000.000,00		
		-	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		50.000.000,00		
		-	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		1.642.108.000,00		
		-	Program Pengembangan Ketenaga Listrikan		2.180.901.900,00		

No	Bidang Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
6	Ketahanan Pangan, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan kesejahteraan Petani - Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian / Perkebunan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		1.074.845.968,00 113.144.430,00 570.658.350,00 9.085.907.480,00		
7	Penanggulangan Kemiskinan, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	- Program Pembinaan Anak Terlantar - Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial - Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial - Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan		58.600.000,00 700.000.000,00 203.435.000,00 194.455.000,00		

8	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, meliputi: Urusan Pemerintahan daerah	-	Program Penataan Administrasi kependudukan	982.349.909,00		
		-	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	298.845.000,00		
		-	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	867.285.500,00		
		-	Program Peningkatan Akses Usaha Bagi UMK dan Koperasi kepada Sumber Daya Produktif	42.000.000,00		
		-	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	122.000.000,00		
		-	Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	418.039.500,00		
		-	Program Pembinaan Kemitraan UMKM	140.589.078,00		
		-	Program Pengembangan Industri Logam, mesin, kimia, tekstil, Transpormasi dan Telematika	72.597.000,00		
		-	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	815.900.000,00		
		-	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	434.448.500,00		
		-	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	402.650.201,00		

No	Bidang Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
9	Pembangunan Wilayah, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	- Peningkatan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		31.544.572.030,00 574.830.000 5.170.710.110,00 4.297.023.250,00 6.092.856.000,00 400.835.274,00 160.178.920,00 285.378.920,00		

No	Bidang Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, meliputi: Urusan Pemerintahan Daerah	- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak criminal - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		260.454.500,00 43.722.000,00 25.000.000,00 42.045.000,00 124.390.133,00 197.000.000,00 45.000.000,00		

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansi RKPD dan menjadi penghubung terhadap aspek penganggaran. Sesuai amanat Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Dalam kaitannya dengan siklus pengelolaan keuangan daerah, Pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Selanjutnya, Pasal 35 menyebutkan bahwa berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Dari aspek pembentukan arsitektur kinerja pembangunan mensyaratkan agar hubungan kinerja antar dokumen harus bersinergi agar pengendalian hasil-hasil pembangunan dapat dilakukan melalui antar dokumen. Dari hubungan antar dokumen, kinerja pembangunan dapat disederhanakan dalam satuan impact, outcome dan output. Arsitektur yang demikian itu dimaksudkan untuk memudahkan tentang apa yang akan dicapai dalam lima (5) tahun dan tahunan serta bagaimana sasaran-sasaran pembangunan tersebut akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan di dalamnya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah

5.1. RENCANA PROGRAM UNTUK MENCAPAI PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah Tahun 2021. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Pendidikan
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

2. Kesehatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
- e. Program Perberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan permukiman

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- c. Program Penyelenggaraan Jalan

- d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i. Program Penataan Bangunan Gedung
- j. Program Pengembangan Permukiman
- k. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- l. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

4. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program penanggulangan bencana
- c. program penanggulangan kebakaran

6. Sosial, DPMD

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program pemberdayaan sosial
- c. program rehabilitasi sosial
- d. program perlindungan dan jaminan sosial
- e. program penanganan bencana
- f. program pengelolaan taman makam pahlawan
- g. program penataan desa
- h. program administrasi pemerintahan desa
- i. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

7. Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d. Program Hubungan Industrial
- e. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- g. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Menengah
- i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- j. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemenuhan Hak Anak
- c. Program Perlindungan Khusus Anak
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- e. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- f. Program Perlindungan Perempuan
- g. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak
- h. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- i. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- j. Program Pengendalian Penduduk
- k. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- l. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Lingkungan Hidup

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Berracun
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- g. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- h. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- i. Program pengelolaan persampahan

10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pendaftaran Penduduk
- c. Program Pencatatan Sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

11. Perhubungan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran

12. Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Aplikasi Informatika
- c. Program Komunikasi dan Informasi Publik
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

13. Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM
- h. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- i. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- j. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- k. Program Pengembangan Ekspor
- l. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- m. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

14. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Penanaman Modal
- e. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- f. Program Promosi Penanaman Modal
- g. Program Pelayanan Penanaman Modal

15. Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pengembangan kapasitas daya saing pemuda
- c. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- d. Program pengembangan kebudayaan
- e. Program pengembangan kesenian tradisional
- f. Program pembinaan sejarah
- g. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- h. Program pengelolaan permuseuman
- i. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- j. Program pemasaran pariwisata

16. Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program perlindungan dan penyelamatan arsip
- c. Program pengelolaan arsip
- d. program pembinaan perpustakaan

17. Perikanan dan Peternakan

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah

- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- e. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

18. Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- c. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- d. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- e. Program perizinan usaha pertanian
- f. Program pnyuluhan pertanian
- g. Program penanganan kerawanan pangan
- h. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- i. program penanganan kerawanan pangan
- j. program pengawasan keamanan pangan
- k. program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

19. Sekretariat Daerah

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan

20. Sekretariat Dewan

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program layanan dan administrasi keuangan
- c. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

21. Inspektorat

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program penyelenggaraan pengawasan
- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

22. Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- e. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

23. Pendapatan Daerah

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pengelolaan pendapatan daerah

24. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- c. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- d. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

25. Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program kepegawaian daerah
- c. Program pengembangan sumberdaya manusia

26. BPBD dan Pemadam Kebakaran

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Penanggulangan bencana
- c. Program Penanggulangan kebakaran

27. Kecamatan Dusun Tengah

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pengembangan wilayah kabupaten administrasi
- c. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

28. Kecamatan Pematang Karau

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

29. Kecamatan Awang

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- c. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

30. Kecamatan Patangkep Tutui

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

31. Kecamatan Dusun Timur

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pengembangan wilayah kabupaten administrasi
- c. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

32. Kecamatan Benua Lima

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

33. Kecamatan Paku

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

34. Kecamatan Raren Batuah

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

35. Kecamatan Karusen Janang

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- c. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- d. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- e. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

36. Kecamatan Paju Epat

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
- c. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SELURUH PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Daftar program/kegiatan berikut komponen-komponennya disusun menurut urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Matriks program dan kegiatan SKPD, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Indikator Kinerja.
- Lokasi Kegiatan.
- Target capaian kinerja program/kegiatan.
- Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
- Sumber Dana.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu: (a) Indikator kinerja kunci pembangunan daerah, (b) Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kunci pembangunan daerah adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah. Indikator-indikator ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan beberapa perubahan sesuai dengan kondisi daerah.

Kelompok Indikator ini dimaksud merupakan kesimpulan (kristalisasi) dari berbagai indikator program pembangunan baik yang merupakan indikator kinerja bagi Perangkat Daerah (PD) dan juga indikator kinerja program lintas Perangkat Daerah (PD). Secara garis besar, Indikator Kunci ini, terdiri atas tiga aspek yang selanjutnya dirinci dalam beberapa fokus, sebagai berikut:

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2. Fokus Kesejahteraan Sosial
3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

B. Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Pelayanan Dasar
2. Fokus Pelayanan Penunjang

C. Daya Saing Daerah

- 1. Fokus Kemampuan ekonomi daerah
- 2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
- 3. Fokus Iklim Berinvestasi
- 4. Fokus Sumber Daya Manusia

6.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1.

Matriks Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2021

INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2018)	TAHUN 2021
LPE	5,98	6,99
IPM	70,57	72,53
IPG	88,16	90,62
Indeks Gini	0,307	0,286
Angka Kriminalitas	0,16	0,1
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	80
IKLH	NA	65,08
LPE Sektor Pertanian	6,54	7,51
LPE sektor Industri Pengolahan	7,84	9,28
PDRB Sektor pariwisata	NA	5,3
Jumlah kunjungan wisatawan	10.969	11.990
Pengeluaran perkapita	1.083.989	1.361.330
Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	12.000 Milyar	350
Nilai investasi berskala nasional (PMA)	5,70 Juta US\$ (2013)	3,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,68	2,89
Rata2 lama sekolah	9,04	9,35
Harapan Lama Sekolah	12,8	14,05
Angka harapan hidup	67,97	69,32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,8 (2015)	82,70
Persentase panjang jalan kondisi baik	44,48	64,83
Persentase RT yang terakses air bersih	76,2	92,07
Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	34,75	11,58
Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)	99,84	99,87
Persentase jumlah sampah yang tertangani	73%	74%

INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2018)	TAHUN 2021
Status Indeks Kualitas Air	Cemar Sedang	Cemar Sedang
Status Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik
Tutupan Lahan	Rendah	Sedang
Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)	108	36
Persentase wirausaha baru	NA	40*
Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	231 atlet	289
Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	3 event budaya	5
Predikat Akuntabilitas Kinerja	C	BB
Jumlah kasus korupsi	4 (2018)	1
Nilai IKM (Nilai Interval)	3,198	3,265

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
01.00	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)	6.320,00	7.539,69	8.235,15	8.994,76	9.824,44	10.730,65
02.00	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	5,98	6,49	6,74	6,99	7,25	7,5
03.00	PDRB per kapita	52,6	59,22	62,87	66,75	70,86	75,22
04.00	Indeks Gini	0,307	0,296	0,291	0,286	0,28	0,275
05.00	IPG	88,16	89,8	90,21	90,62	91,03	91,5
06.00	Angka Kriminalistas	0,16	0,15	0,1	0,1	0	0
07.00	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	76	78	80	82	84
08.00	IKLH	NA	64,23	66,47	68,51	69,34	70,16
09.00	LPE sektor Pertanian	6,54	7,03	7,27	7,51	7,76	8
10.00	LPE sektor Industri Pengolahan	7,84	8,56	8,92	9,28	9,64	10
11.00	Pengeluaran perkapita	1.083.989	1.222.659	1.291.995	1.361.330	1.430.665	1.500.000
12.00	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,68	3,79	3,34	2,89	2,45	2
13.00	Rata2 lama sekolah	9,04	9,19	9,27	9,35	9,42	9,5
14.00	Harapan Lama Sekolah	12,8	13,48	13,77	14,05	14,34	14,63
15.00	Angka harapan hidup	67,97	68,65	68,99	69,32	69,66	70
16.00	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	75,8 (2015)	80,4	81,55	82,7	83,85	85

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
17.00	Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)	108	72	54	36	18	0
18.00	Predikat Akuntabilitas Kinerja	C	CC	B	BB	BB	A
19.00	Jumlah kasus korupsi	4 (2018)	3	2	1	0	0
20.00	Nilai IKM (Nilai Interval)	3,198	3,225 (Baik)	3,245	3,265	3,285	3,305
21.00	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.00	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	7,34	7,49	7,64	7,79	7,95	8,1
23.00	Jumlah penduduk	120.254	127.297	130.971	134.752	138.642	142.644
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
01.00	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.083.989	1.105.669	1.127.782	1.150.338	1.173.345	1.196.811
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
01.00	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	55	68,60	68,65	68,7	68,75	68,8
1.2.	Angka partisipasi kasar						
01.02.0 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109,65	107,24	106,03	104,83	103,62	102,4125
01.02.0 2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	82,45	82,95	83,45	83,95	84,45	84,95

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.4.	Angka Partisipasi Murni						
01.04.0 1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,47	98,67	98,87	99,07	99,27	99,47
01.04.0 2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	75,33	75,85	76,33	76,83	77,33	77,83
02.00	Kesehatan						
02.01.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000
02.03.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000
02.04.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6/1000	5/1000	4/1000	3/1000	2/1000	1/1000
02.05.	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	50/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000	120/100.000
02.06.	Rasio Posyandu per satuan balita	1.69	2	2	2	2	2
02.07.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1/30.000 pndk	1	1	1	1	1
02.08.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1/100.000 pddk	1	1	1	1	1
02.09.	Rasio Dokter per satuan penduduk	28.15	30	30	30	30	30
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	80%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.12	Cakupan Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	79%	90%	90%	90%	90%	90%
02.13	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.16	Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	93%	95%	95%	95%	95%	100%
02.17	Cakupan balita pneumonia yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.18	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.19	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.20	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0	0
02.21	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	80,25%	85%	85%	85%	85%	85%
02.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	94%	100%	100%	100%	100%	100%
02.24	Penderita diare yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.25	Cakupan Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	85%	100%	100%	100%	100%	100%
02.26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%	100%	100%	100%	100%	100%
02.27	Cakupan kunjungan bayi	90%	100%	100%	100%	100%	100%
02.28	Cakupan Puskesmas	1	1	1	1	1	1
02.29	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	82,64	100%	100%	100%	100%	100%
02.30	Cakupan pelayanan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan	77%	100%	100%	100%	100%	100%
02.31	Cakupan neonatus dengan komplekasi yang di tangani	70%	100%	100%	100%	100%	100%
02.32	Cakupan pelayanan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan	85%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart						
02.33	Cakupan pelayanan anak balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	90%	100%	100%	100%	100%	100%
02.34	Presentase balita gizi kurang	0,05%	< 0.045%	< 0.040%	< 0.035%	< 0.030%	< 0.025%
02.35	Prevalensi balita stunting	17%	15%	12%	9%	7%	5%
02.36	Persentase gizi buruk dan gizi kurang yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.37	Cakupan Desa Siaga Aktif	46%	70%	73%	75%	77%	80%
02.38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.39	Cakupan anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	20%	100%	100%	100%	100%	100%
02.40	Jumlah Pengunjung usia 15-59 Tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	96,35%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.41	Jumlah Pengunjung usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	84,43%	100%	100%	100%	100%	100%
02.42	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	18%	100%	100%	100%	100%	100%
02.43	Jumlah Penyandang Diabetis Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	17%	100%	100%	100%	100%	100%
02.44	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) diwilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	RSUD						
02.47	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit	96	100	110	115	120	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
03.01.	Pekerjaan Umum:						
03.01.0 1	Persentase panjang jalan kondisi baik	44,48	54,65	59,74	64,83	69,91	75
03.01.0 2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,69%	61,69%	69,09%	75,77%	78,77%	83,18%
03.01.0 4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	61,69%	61,69%	69,09%	75,77%	78,77%	83,18%
03.01.0 7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	77,29%	77,29%	83,67%	89,77%	92,60%	100%
03.01.1 0	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	50%	60%	70%	80%	90%
03.01.1 1	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	20%	20%	40%	70%	90%	100%
03.01.1 2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	20%	20%	40%	70%	90%	100%
03.01.1 3	Rasio Jaringan Irigasi	30%	30%	50%	70%	85%	100%
03.01.1 4	Persentase penduduk berakses air minum	74,07%	74,07%	77,36%	85,13%	92,56%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.01.1 5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	74,07%	74,07%	77,36%	85,13%	92,56%	100%
03.02.	Penataan Ruang:						
03.02.0 1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	30%	30%	50%	75%	90%	100%
03.02.0 2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	30%	30%	50%	75%	90%	100%
03.02.0 4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	30%	30%	50%	75%	90%	100%
04.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
04.01	Persentase RT yang terakses air bersih	76,2	84,13	88,1	92,07	96,03	100
04.02	Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	34,75	23,17	17,38	11,58	5,79	0
04.03	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) (%)	97,00	97,35	97,85	98,00	98,15	98,51
04.04.	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00	79,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
04.05.	Persentase RTH Publik yang terkelola	1%	1%	5%	5,5%	6%	6,1%
04.06.	Rasio rumah layak huni	94,37%	95,11%	96,21%	97,03%	98,17%	99,02%
04.07	Pembangunan Jalan dan Drainase Wilayah Perkotaan (m')	13.879	10.000	9.500	9.000	8.500	7.000
04.08	Rehabilitasi Rumah Layak Huni (unit)	1.602	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
04.09	Persentase permukiman yang tertata	60,52%	70%	75%	80%	83%	85%
04.10	Persentase luas permukiman kumuh	0,35%		0,33%	0,31%	0,29%	0,28%
04.11	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan	5,34%		5,33%	4,31%	3,29%	3,08%
04.12	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	5,63%		5,13%	4,82%	4,51%	4,21%
04.13	Peningkatan Kualitas lingkungan pada kawasan kumuh desa tertinggal, desa tradisional, dan desa nelayan	NA	0	10 Unit	10 Unit	10 Unit	40 Unit
05.00	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.01	Persentase pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur		100%	100%	100%	100%	100%
05.02	Persentase Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran sebagai Aparatur Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
05.03	Terlaksananya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%
05.04	Cakupan wilayah pelaksanaan deteksi dini ancaman keamanan		100%	100%	100%	100%	100%
05.05	Persentase potensi gangguan keamanan yang terdeteksi		100%	100%	100%	100%	100%
05.06	Cakupan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi lainnya		70%	75%	80%	85%	90%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.07	Cakupan wilayah pendidikan politik masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%
05.08	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi		70%	75%	80%	85%	90%
06.00	Sosial						
06.01.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	26%	100%	100%	100%	100%	100%
06.02.	Prosentase PMKS yang tertangani	36,84%	100%	100%	100%	100%	100%
06.03.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.04.	Prosentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau sekelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.05.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.06.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	0%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial						
06.07.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	47,81%	100%	100%	100%	100%	100%
06.08.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.09.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	16%	100%	100%	100%	100%	100%
	Target Indikator SPM						
06.10	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	26%	100%	100%	100%	100%	100%
06.11	Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di luar panti	36,84%	100%	100%	100%	100%	100%
06.12	Prosentase Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	16%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
06.13	Prosentase Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	0%	100%	100%	100%	100%	100%
06.14	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota	47,81%	100%	100%	100%	100%	100%
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
01.	Tenaga Kerja						
01.01.	Angka partisipasi angkatan kerja	59.197 org	61.361	63.629	66.006	68.511	71.173
01.02.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	81,72%	82,18	82,65	83,13	83,61	84,1
01.03.	Tingkat pengangguran terbuka	1,79%	1,66	1,54	1,48	1,3	1,13
01.04.	Rasio penduduk yang bekerja	95,20%	95,41	94,65	94,7	94,76	95,2
01.06.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	80,25%	80,81	81,38	81,9	82,53	83,91
01.07.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	22.00 %	23,13	24,73	25,77	27,39	29,26
01.08.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per	50 Kasus	50	45	40	35	30

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Tahun						
01.09.	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	45 Buah PB	45	40	35	30	25
01.10	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1.006 org	1.224	1.468	1.761	2.113	2.535
01.12	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	3.454 orang	3.626	3.806	3.996	4.196	4.405
01.16	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	24 org	30	50	85	110	145
01.17	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	35 org	115	130	190	200	220
01.18	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	5 org	5	8	10	13	15
01.19	Rasio lulusan S1/S2/S3	9,18%	9,69	10,23	10,79	11,37	11,97
02.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
02.01.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,18	53,19	53,21	53,21	53,22	53,27
02.02.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	30	30	30	30	30

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.03.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	41,032	42,065	43,13	44,68	45,07	46,7
02.04.	Rasio KDRT	0,0127	0,0125	0,0122	0,0121	0,0119	0,0114
02.05.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	1,851	1,5	1,2	1	0,5	0
02.06.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	95,14	95,15	95,18	95,2	95,232	95,25
02.07.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
02.08.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100
02.20	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	76,46	78	79	81	83	86

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.00	Pangan						
3.1.	Pencapaian Skor pola pangan harapan (PPH)	90,2	91,4	92,6	93,9	95,1	96,3
3.2.	Penguatan cadangan pangan	1 Gapoktan	2 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan
3.3.	Penanganan daerah rawan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
03.04	Ketersediaan energi dan protein perkapita	93,79%	93,79%	93,79%	93,79%	93,79%	94,00%
03.05	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
04.00	Pertanahan						
03.05	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan						
05.00	Lingkungan Hidup	1.620	120	120	120	120	
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	0	0	1 dokumen RPPLH & Perda RPPLH	0	0	0
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0 (belum terintegritas)	0		Terintegritasi	Terintegritasi	Terintegritasi
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1 dokumen KLHS	0	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
05.29	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	56,66/3 titik	57,32	57,81	57,92	61,36	61,36

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.30	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	96,35	96	96,45	96,52	96,73	96,99
05.31	Persentase kualitas Tutupan Lahan	47,71	49	50,5	55,35	55,67	60,46
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	22 perusahaan	22 perusahaan	22 perusahaan	22 perusahaan	22 perusahaan	22 perusahaan
05.33	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	5 orang	0	1	1	1	1
05.42	Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	5 Orang	0	1	1	1	1
		2 gps,	0 gps,	0 gps,	1 gps,	0 gps,	0 gps,
		1 paket alat lab,	1 paket alat lab,	0 paket alat lab,	0 paket alat lab,	0 paket alat lab,	0 paket alat lab,
		1 mobil	1 mobil	0 mobil	0 mobil	0 mobil	0 mobil
		0 motor	6 motor	0 motor	0 motor	0 motor	0 motor
		0 drone	1 drone	0 drone	0 drone	0 drone	0 drone
05.43	Timbulan Sampah yang ditangani	17.556 ton/tahun	17.908 ton/tahun	18.266 ton/tahun	18.631 ton/tahun	19.004 ton/tahun	19.384 ton/tahun

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.44	jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	10 ton/tahun	15 ton/tahun	20 ton/tahun	25 ton/tahun	25 ton/tahun
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	73%	80%	85%	87%	91%	95%
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di kabupaten	Open dumping	Open dumping	Sanitary Landfill	TPST 3R	TPST 3R	UPTD TPA
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	0	1	1	1	1
05.49	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0 Perusahaan	35	34	34	32	30
05.50	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	1	0	1	1	1	3
05.51	Persentase tersedianya data emisi gas rumah kaca (IGRK)	0%	55	57	57	58	58
05.52	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Ekosistem dan Keanakeragaman Hayati)	55%	58	58	59	59	60
05.53	Presentase lahan kritis yang tertangani	0%	57	58	59	60	61

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.54	Terlaksananya inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)/hak ulayat	0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0
05.55	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	201 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
06.00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
06.01.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91
06.02.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98
06.03	Persentase Penduduk berKTP-el Per Satuan Penduduk	85,51%	87,66%	89,72%	91,34%	93,86%	95,42%
06.04	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	5.237 Lembar	6.762	7.489	8.503	9.614	10.122
06.05	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	379 Lembar	426	453	532	589	642
06.06	Jumlah Penduduk Kabupaten	112.363 Jiwa	114.048	115.759	117.496	119.258	121.047
07.00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
07.01	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	190	210	215	220	225	230

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
07.02	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	75	80	85	90	95	100
07.03	Jumlah Desa berstatus swasembada	3	5	7	9	11	13
07.04	Jumlah Desa berstatus swadaya	74	73	72	71	70	69
07.05	Jumlah Desa berstatus swakarya	24	23	22	21	20	19
08.00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
08.01.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,86%	2,81%	2,75%	2,70%	2,60%	2,44%
08.02.	Total Ferlity Rate (TFR)	2,76%	2,53%	2,23%	2,23%	2,20%	2,18%
08.03.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	66,70%	68,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
08.04.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0%	10%	30%	60%	75%	100%
08.05.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas	0	1	2	2	2	2

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	penduduk						
08.06.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0	1	2	3	4	7
08.07.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	10	15	20	25	35
08.08.	rata-rata jumlah anak per keluarga	2,76	2,53	2,23	2,23	2,2	2,18
08.09.	ratio akseptor KB	80,3	80,5	81	83	83	84
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,40%	79,55%	80,45%	80,55%	80,71	81,00%
08.11	angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	30,4	11	9	7	5	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.12	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	50%	100%	100%	100%	100%	100%
08.13	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed)	11,40%	11,20%	11,10%	11%	10,90%	10,80%
08.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	67%	72%	74%	76%	77%	80%
08.15	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	13,46%	14,45%	15,45%	16,45%	17,45%	18,45%
08.16	Cakupan anggota keluarga bina keluarga balita (BKB) ber-KB	60%	70%	80%	85%	90%	100%
08.17	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.18	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.19	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	3	3	4	5	6	7
08.20	cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja /Mahasiswa	50%	60%	70%	80%	90%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08.25	persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08.26	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	90%	91%	95%	98%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
08.27	persentasi remaja yang terkena infensi menular seksual (IMS)	-	-	-	-	-	-
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	18	23	28	33	38	40
08.29	cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	50%	60%	70%	80%	90%	100%
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	18 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun	>20 tahun
08.31	persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangua keluarga melalui APBD dan APBDes	60%	70%	75%	80%	90%	100%
09.00	Perhubungan						
09.01.	Rasio sarana dan prasarana layanan perhubungan dalam kondisi baik	65%	70%	75%	80%	85%	90%
09.02.	Persentase cakupan area pelayanan	65%	70%	75%	80%	85%	90%
10.00	Komunikasi dan Informatika						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.01	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik radio	-	50	60	70	80	100
10.02	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi publik televisi	-	-	20	30	40	50
10.03	Jumlah Pemirsa Radio dan Televisi milik pemerintah daerah	-	100	200	300	400	500
10.04	Jumlah Radio siaran milik pemerintah daerah	-	-	1	1	1	1
10.05	Jumlah Televisi kabel/UHF milik pemerintah daerah	-	-	-	1	1	1
10.06	Jumlah desa yang diberikan bantuan pesawat radio dan televisi sebagai sarana informasi pedesaan	-	-	20	30	40	50
10.07	Jumlah media luar ruang dan konvensional yang didiseminasikan/dipublikasi kepada masyarakat	-	50	100	200	300	400
10.08	Jumlah Media Sosial Elektronik milik pemerintah daerah	2	2	3	4	5	6

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.09	Jumlah pengikut/follower/subscriber Media Sosial Elektronik milik pemerintah daerah	100	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
10.10	Jumlah fasilitas layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID	-	-	1	1	1	1
10.11	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	-	-	-	70	80	90
10.12	Rasio pengaduan yang ditangani terhadap pengaduan yang diterima	-	-	60	70	80	90
10.13	Jumlah sarana pengaduan yang tersedia untuk masyarakat	2	2	3	3	4	4
10.14	Jumlah Data Center (server) milik Pemerintah Daerah	1	1	2	2	3	4
10.15	Jumlah Media Website milik pemerintah daerah	3	5	10	22	30	43
10.16	Jumlah pengunjung website milik pemerintah daerah	100.000	190.000	266.000	372.400	521.360	729.904
10.17	Jumlah Kantor OPD/UPTD Terkoneksi Jaringan Internet/Intranet	5	5	10	20	43	64

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.18	Jumlah Rata-Rata Kecepatan internet/Bandwidth Kantor OPD/UPTD	5	5	6	7	8	10
10.19	Jumlah Media Center milik Pemerintah Daerah	-	-	1	1	1	1
10.20	Jumlah Aplikasi milik Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	-	2	4	6	8	10
10.21	Jumlah Email go.id untuk OPD dan ASN Pemerintah Daerah	5	43	64	128	256	512
10.22	Jumlah Command Center milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1	1
10.23	Jumlah CCTV terpasang di ruang publik dan fasilitas vital milik Pemerintah Daerah	-	2	5	8	10	15
10.24	Jumlah Security Operation Center (SOC) milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1	1
10.25	Jumlah Layanan Internet di Ruang Publik	-	1	2	3	4	5
10.26	Jumlah pengunjung/pengguna fasilitas internet di ruang publik	-	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
10.27	Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau layanan telekomunikasi yang berkualitas	40	60	70	80	90	100
10.28	Jumlah UMKM di Barito Timur yang dilatih/diberdayakan dalam pemanfaatan media online (e-commerce)	-	-	2	4	6	8
10.29	Jumlah UMKM di Barito Timur yang menjalankan usaha melalui media online (e-commerce)	-	-	1	2	4	5
10.30	Prosentase jumlah relawan TIK terhadap desa di Kabupaten Barito Timur	-	-	10	15	20	25
10.31	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/Komunitas Kreatif bidang TIK	-	-	1	2	4	5
10.32	Jumlah Pusat Komunitas Kreatif	-	-	-	1	1	1
10.33	Jumlah Angkatan Kerja Muda yang difasilitasi untuk memperoleh pelatihan	-	-	5	10	15	20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	TIK bersertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)						
11.00	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.01	Persentase koperasi aktif	44,18	54,18	59,18	64,18	69,18	74,18
11.02	Jumlah Koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam aktif	26	28	30	32	34	36
11.03	Jumlah UMKM aktif	15.328	15.353	15.378	15.403	15.428	15.453
11.04	Jumlah usaha mikro dan kecil yang memiliki IUMK	50	500	1.000	1.500	2.000	2.500
12.00	Penanaman Modal						
12.01	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	570 Milyar (2013)	700	850	800	950	1000
12.02	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	5,70 Juta US\$ (2013)	7	8,5	8	9,5	10
12.03	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	79	79	79	79	79	79
12.04	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	447.992.427.605,00	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142	30.513.972.739.142
12.05	Rasio daya serap tenaga kerja						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
12.06	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	447.992.427.605,00	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537	30.065.980.311.537
13.00	Kepemudaan dan Olah Raga						
13.01	Persentase organisasi pemuda yang aktif	65%	70%	75%	80%	85%	90%
13.02	Persentase organisasi olahraga yang aktif	50%	70%	75%	80%	85%	90%
13.04	Jumlah Pelatih yang bersertifikasi	39 Orang	45	65	77	89	92
13.05	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	211 Buah	215	220	225	235	250
13.06	Jumlah atlet berprestasi	72 Orang	186	289	337	405	475
14.00	Statistik						
14.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.02	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.03	Buku "PDRB"						
14.04	Cakupan ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah		60%	65%	70%	75%	80%
14.05	Jumlah Lab Statistik Center milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1	1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
14.06	Jumlah Administrasi Statistik Sektoral yang dipublikasikan secara elektronik	-	-	2	4	6	8
14.07	Jumlah Produk Administrasi Statistik Sektoral yang dipublikasikan kepada masyarakat	-	1	2	3	4	5
15.00	Persandian						
15.01	Cakupan informasi pemerintah penting yang tersandikan		60%	65%	70%	75%	80%
15.02	Tingkat ketersediaan dukungan peralatan persandian		75%	80%	85%	90%	90%
16.00	Kebudayaan						
16.01	Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya	3 Event	5	6	7	8	9
16.02	Jumlah pembinaan terhadap kelompok penyelenggara seni dan budaya.	12 Kelompok	14	16	18	20	25
16.03	Jumlah Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dilestarikan	205 Buah dan 16 Buah	225	230	235	240	250

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
17.00	Perpustakaan						
17.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.801	6.240	7.800	9.360	12.480	14.040
17.02	Koleksi bahan Pustaka yang tersedia di Perpustakaan Daerah	19.453	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
17.03	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.052	4.152	4.210	4.300	4.400	4.500
17.04	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat	0	1	2	2	3	4
17.05	Peningkatan Jumlah:						
17.05.0 1	Perpustakaan Desa	35	37	39	41	43	45
17.05.0 2	Tenaga Pengelola Perpustakaan	70	72	74	76	78	79
17.05.0 3	Koleksi Perpustakaan	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
17.06	Penyediaan Akses Internet kepada Pengunjung	0	1	2	2	2	2
18.00	Kearsipan						
18.01	Pembinaan kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	5	7	10	12	15	20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
18.02	Pengolahan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	50	55	60	75	80	85
18.03	Pembinaan Sumber daya Manusia (SDM) Kearsipan	1	2	3	4	5	6
18.04	Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol Masyarakat	1	2	3	4	5	6
Layanan Urusan Pilihan							
01.00	Pariwisata						
01.01	PDRB Sektor pariwisata	8.810.000,- (0,01 %)	0,42%	0,45%	0,50%	0,75%	1,00%
01.02	Jumlah kunjungan wisatawan	10.969 Orang	11.479	11.735	11.990	12.245	12.500
01.03	Jumlah obyek wisata yang dipasarkan	30 Obyek	31	32	33	34	35
01.04	Jumlah destinasi pariwisata unggulan yang dikembangkan	12 Obyek	15	17	19	20	22
01.05	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	3 Kelompok	5	7	9	12	15
02.00	Pertanian						
02.01	Luas Sawah	10.313	10.829	11.334	11.860	12.376	12.891
02.02	Produktivitas Padi Sawah	31,47	31,63	31,85	35,035	38,58	40,509
02.03	Produktivitas Padi Ladang	14,65	14,72	14,82	14,93	15,05	15,81

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.04	Produksi Padi	38.387	38.579	38.887	42.776	44.914	47.159
02.05	Jumlah Produksi Daging (Sapi,kambing, babi)	368.382	105,81	107,92	110,08	112,28	114,53
02.06	Jumlah Produksi Dagingayam/ unggas	621.463	456,55	474,86	484,36	494,04	503,92
02.07	Rasio kasus temuan bahan pangan asal hewan tidak layak konsumsi yang ditangani	-	100%	100%	100%	100%	100%
02.08	Jumlah Anjing yang di Vaksin untuk mencegah kasus Rabies	7.985	8.144	8.303	8.462	8.621	8.780
02.09	Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat	54.260,18	54.460,18	54.569,10	54.678,02	54.786,94	54.895,86
02.10	Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat	30,72	66,72	111,72	156,72	201,72	246,72
02.11	Luas Lahan Perkebunan Kakao Rakyat	74,01	121,01	168,01	215,01	262,01	309,01
02.12	Luas Lahan Perkebunan Sawit Rakyat	449,65	499,65	549,65	599,65	649,65	699,65
03.00	Kehutanan						
03.01.	lahan kritis	71.981,7 Ha	61.698,60 Ha	51.415,50 Ha	41.132,40 Ha	30.849,30 Ha	20.566,20 Ha
03.02.	Kerusakan Kawasan Hutan	59.785 Ha	51.244 Ha	42.704 Ha	34.163,2 Ha	25.622,4 Ha	17.081,6 Ha
04.00	Energi dan Sumber Daya Mineral						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
04.01.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	80%					
04.02.	Rasio ketersediaan daya listrik	80%					
05.00	Perdagangan						
05.01	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	6,95	7,12	7,2	7,27	7,35	7,4
05.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal						
	Jumlah pedagang besar	43	48	53	58	60	65
	Jumlah pedagang menengah	218	220	225	230	235	242
	Jumlah pedagang kecil	210	215	218	221	225	230
05.03.	Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.04.	Rasio pasar daerah yang representatif	75	78	80	83	85	90
06.00	Perindustrian						
06.01.	Pertumbuhan industri kecil menengah	637	643	680	710	750	800
06.02	Jumlah kontribusi PDRB dari sector industry (dalam	125.000	130.000	135.000	145.000	150.000	155.000

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
	juta rupiah)						
06.03	Jumlah IKM baru		5	5	5	5	5
06.04	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	7,64	8	9	10	11	12
06.05	Jumlah IKM	637	643	680	710	750	800
06.06	Jumlah Tenaga Kerja Industri	1.393	1.320	1.470	1.520	1.570	1.620
06.07	Nilai investasi industri (Juta Rupiah)	13.083,95	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
07.00	Transmigrasi						
07.01.	Persentase transmigran swakarsa						
08.00	Kelautan dan Perikanan						
08.01.	Produksi perikanan (Ton)	2.190,04	2.409,04	2.649,95	2.914,94	3.206,44	3.527,08
08.02.	Konsumsi ikan (Org/Kg/Kapita)	25	27,5	30	33	36,3	39,9
08.04.	Jumlah KUB (Kel.Usaha Bersama)	25	27	29	32	35	38
08.05	Jumlah kebijakan bidang IKM yang diterbitkan bidang perikanan	0	1	1	1	1	1
08.06	Koperasi perikanan	0	5	7	9	11	13
Penunjang Urusan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
01.00	Perencanaan Pembangunan						
01.01.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
01.02.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
01.03.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
01.04.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
02.00	Keuangan						
02.01.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
02.02.	Nilai Maturitas SPIP	3,08	3,57	4,33	5,02	5,77	6,38
02.03.	Skor LKIP	CC	B	B	B+	A	A
02.04.	Skor EKPPD	3,05	3,87	5,06	6,32	6,79	7,02
02.05.	Peresentase anggaran dengan realisasi	95,11%	95,20%	95,35%	95,60%	95,80%	96,00%
02.06.	Persentase SILPA terhadap APBD	3,34%	3,33%	3,32%	3,33%	3,34%	3,35%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
02.07.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	3,20%	3,19%	3,18%	3,20%	3,22%	3,25%
02.08.	Persentase belanja pendidikan (20%)	22,66%	22,70%	22,75%	22,85%	22,90%	23,05%
02.09.	Persentase belanja kesehatan (10%)	15,86%	15,89%	15,90%	15,95%	15,98%	16,03%
02.10	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	57:43:00	56:43:00	53:47:00	52:48:00	51:49:00	50:50:00
02.11	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.12	Penetapan APBD	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal
03.00	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
03.01	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.02.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	1%	6%	10%	14%	17%	20%
03.03.	Persentase Data Kediklatan terdokumentasi dan terpublikasi	50%	100%	100%	100%	100%	100%
03.04.	Persentase Siswa/I SMA/MA mendapatkan informasi penerimaan IPDN	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
03.05.	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	36	36	36	36	36
03.06.	Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	135	149	149	149	149	149
03.07.	Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	401	516	516	516	516	516
03.08.	Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	1052	1100	1075	1050	1025	1000
03.09.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2086	2100	2075	2050	2025	2000
03.10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,198	3,225	3,245	3,265	3,285	3,305
04.00	Penelitian dan pengembangan						
04.01	Rasio kajian litbang yang diterapkan		10%	20%	30%	40%	50%
05.00	Pengawasan						
05.01.	Persentase tindak lanjut temuan	75%	75%	77%	80%	85%	90%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Data awal	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
05.02	Jumlah Temuan hasil pemeriksaan APIP Kabupaten	36	30	29	28	26	25
06.00	Sekretariat Dewan						
06.01	Jumlah perda inisiatif DPRD yang ditetapkan	2	2	2	2	2	2

6.2. Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan DPRD tersebut memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut akan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan riil anggaran.

Tabel 6.3. Rekapitulasi Pokok-pokok Pikiran DPRD

No	Nama	Perangkat Daerah	Disetujui	Total Usulan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah	Tidak disetujui	Total Usulan	Pagu (Rp)
1.	Winda Sari, S.Kom, MM								

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

Tabel 6.3. Rekapitulasi Pokok-pokok Pikiran DPRD

No	Nama	Ringkasan Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Total Usulan	Disetujui	Tidak Disetujui	Total Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Winda Sari, S. Kom, MM	- Pengaspalan jalan Desa Matabu dalam 800 M	Desa Matabu	PU					
		- Perbaikan jalan Baruh Rintis yang rusak	Desa Matabu	PU					
		- Rehab gedung Pustu	Desa Maragut	Dinas Kesehatan					
		- Rehab gedung Karang Taruna	Desa Maragut	PU					
		- Pembelian operasional siaga dan mobil jenazah	Desa Maragut	Dinas Kesehatan					
		- Aliran PDAM	Desa Kambitin	PDAM					
		- Perbaikan gedung Poskesdes	Desa Kambitin	Dinas Kesehatan					
		- Perbaikan gedung Pustu	Desa Kambitin	Dinas Kesehatan					
2	H. Ahmadi	- Pembuatan jembatan jalan	Desa Ampah II	PU					
		- Siring tebing	Desa Ampah II	PU					
		- Saluran irigasi	Desa Ampah II	PU					
		- Pembangunan langgar Al-Amiin	Desa Putai	Setda					
		- Pengecoran jalan Alternatif Desa Putai dengan Bantai Karau sepanjang 1,3 Km	Desa Putai	PU					
		- Pemekaran desa Urup-Asak dari Desa Putai	Desa Putai	Setda					
3	Broelalano	- Peningkatan jalan desa Patai-Harara Kec. Dusun Timur	Desa Patai Harara	PU					
		- Pembuatan kolam ikan bserta bibit ikan dan pakan		Dinas Perikanan					
		- Tempat pemandian Umum (MCK) 3 buah		PU					
		- Bibit hewan ternak babi		Dinas Pertanian					
		- Bibit hewan ternak itik dan pakan		Dinas Pertanian					
		- Pembuatan titian ulin padang hawa		PU					
		- Peningkatan jalan desa Patai-Desa Magantis	Desa Patai - Magantis	PU					
		- Peningkatan jalan Desa Harara-Desa Patai	Desa Patai Harara	PU					
		- Bantuan bibit hewan ternak babi		Dinas Pertanian					
		- Bantuan pembuatan kolam ikan dan pakan		Dinas Pertanian					
		- Bantuan berupa bibit hewan		Dinas Pertanian					
		- Bantuan kolam ikan beserta bibit ikan		Dinas Pertanian					
		- Bantuan bibit itik, ayam beserta pakannya	Desa Patai	Dinas Pertanian					
4	Rini. J, S.Sos	- Pembuatan jembatan di tiga titik areal persawahan	Kelurahan Taniran	PU					
		- Pembuatan irigasi di persawahan		PU					
		- Pembuatan balai pertemuan kelompok tani		PU					
		- Lanjutan pengaspalan jalan menuju pekuburan Kristen		PU					
		- Belakang Betang	Desa Lalap	Dinas Kesehatan					
		- Rehab berat Pustu Dea Lalap							
5	Rida Heriyani	- Bantuan bibit ikan	Desa Simpang Bingkuang	Dinas Perikanan					
		- Jembatan titian		PU					
		- Bibit babi		Dinas Pertanian					
		- Bibit jagung		Dinas Pertanian					
		- Saluran Pembuangan		Dinas Pertanian					
		- Bantuan obat-obatan		Dinas Kesehatan					
		- Pembukaan jalan		PU					
		- Pelatihan petani		Dinas Pertanian					
		- Bantuan ternak sapi	Desa Patung	Dinas Pertanian					
		- Mesin/alat tanam padi		Dinas Pertanian					
		- Bibit karet		Dinas Pertanian					
		- Ayam petelor		Dinas Pertanian					
		- Kolam ikan dan bibit ikan		Dinas Perikanan					
		- Semprotan rumput/handsprayer		Dinas Pertanian					

No	Nama	Ringkasan Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Total Usulan	Disetujui	Tidak Disetujui	Total Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Air bersih	Desa Tampa	PDAM					
		- Pelatihan budidaya ayam petelor untuk karang taruna		Dinas Pertanian					
		- Rehab jalan usaha tani		PU					
		- Bantuan bibit ikan, itik dan ayam untuk kelompok lansia		Dinas Pertanian					
		- Pembangunan saluran tersier		PU					
		- Perbaikan saluran tersier		PU					
		- Bantuan hand traktor		Dinas Pertanian					
		- Sumur gali		PU					
		- Perbaikan tanggul	Desa Bantai Napu	PU					
		- Pembuatan saluran pembuangan		PU					
		- Pembuatan pintu air		PU					
6	Mardianto	- Jalan SMA Raren Batuah	Desa Unsum	Dinas Pendidikan					
		- Lanjut jalan kecamatan		PU					
		- Rehap KT Unsum		Dinas Pendidikan					
		- Sanitasi limbah di Puskesmas Unsum		Dinas Kesehatan					
		- Pagar SDN Unsum		Dinas Pendidikan					
		- Jalan PDAM		PU					
		- Rehab SDN Rodok	Desa Rodok	Dinas Pendidikan					
		- Lahan Persawahan		Dinas Pertanian					
		- Jalan Pinang Tunggal-Bararawa	Desa Pinang Tunggal	PU					
		- Jembatan Gantung Karau		PU					
7	H. Rumli, SM.Hk	Pengaspalan jalan menuju lokasi Danau Diaren Desa Magantis	Desa Magantis						
		- RT.06 (200 M)		PU					
		- Pengaspalan jalan Padat Karya Desa Magantis (1 Km)	Desa Magantis	PU					
		- Pembuatan Drainase RT.01 Desa Magantis (1,2 Km)	Desa Magantis	PU					
		Pembuatan Drainase RT.01, RT 02 dan RT 03 Desa Kandris (150 M)	Desa Kandris	PU					
		Pembuatan drainase di 02 Desa Rmania (100 M)	Desa Rmania	PU					
		Peningkatan jalan Usaha Tani Rmania-Junrai 100 M Rmania-	Desa Rmania						
		- Mabaluh 100 M		PU					
		- Pembuatan Gorong-gorong atau Bokolfet	Desa Magantis	PU					
		Pengaspalan jalan Menuju SDN Tamiang Layang IV Kelurahan	Kelurahan Tamiang Layang						
		- Tamiang Layang RT.06		PU					
8	SURDI	- Pembuatan pagar SDN	Desa Rodok	Dinas Pendidikan					
		- Pembuatan jalan gotong royong		PU					
		- Optimalisasi lahan sawah		Dinas Pertanian					
		- Rehab SDN Rodok		Diknas					
		- Rehab SDN Bararawa	Desa Bararawa	Diknas					
		- Rehab total perumahan guru		Diknas					
		- Penimbunan halaman SDN Bararawa		Diknas					
		- Perbaikan gedung serbaguna BPK		Setda					
		Perbaikan jalan kepersawahan dan perbaikan objek wisata	Desa Unsum	Dinas Pariwisata					
		- Malintut							
		- Program pemisahan dan balik nama sertifikat secara gratis		Setda					

No	Nama	Ringkasan Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Total Usulan	Disetujui	Tidak Disetujui	Total Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Pembersihan / normalisasi Sungai dayu 3 Km	Desa Dayu	Dinas PU					
		- pemasangan jaringan Listrik Rt 08 dan Rt 09 (10 Unit)		PLN					
		- pemasangan PJU jalan Negara 15 titik		Perkim					
		- Peningkatan / Pengerasan Jalan mulam Jari Rt . 07 (4 Km)		Dinas PU					
		- Peningkatan / Pengerasan Jalan BPP Pertanian (3 Km)		Dinas Pertanian					
		- Pengadaan bantuan Bibit Ternak Itik/ayam 5.000 ekor		Dinas Pertanian					
		Peningkatan/Pengaspalan jalan Trans 100 dan Trans 200 (4 Km)	Desa Wurun	Dinas PU					
		Rehabilitasi / Normalisasi Saluran Pembuangan Areal		Dinas PU					
		- Persawahan Trans 100 dan Trans 200 (2 Km)		Dinas Pertanian					
		- Percetakan swah 100 Ha		Dinas Pendidikan					
		- Rehabilitasi Gedung SDN Trans 100							
		- Peningkatan / Pengaspalan jalan Kupang Baru - Lagan 3 Km	Desa Kupang Baru	Dinas PU					
		pembangunan siring/slabjalan masuk kerumah Sebanyak 6 rumah (18 Km)		Dinas PU					
		- peningkatan jalan kelokasi wisata memancing		Dispora					
		- pengadaan bibit ternak babi		Pertanian					
		- pengadaan ternak sapi potong		Pertanian					
		- masyarakat mengusulkan peningkatan harga karet		Setda					
		- peningkatan / pengaspalan jalan tangkan - pianggu	Desa Tangkan	Dinas PU					
		- pembuatan siring sungai awang		Dinas PU					
		pembangunan sarana dan prasarana irigasi Areal Persawahan		Dinas PU					
		- desa tangkan		Dinas pendidikan					
		- Pembangunan Pagar SDN Tangkan		DLH					
		- Pengaduan masyarakat ada indikasi pencemaran sungai awang		Setda					
		- masyarakat mengusulkan peningkatan harga karet							
11	Janjo Briano, S.Pd	- Pengaspalan jalan tran 200 Kecamatan Karusen Janang	Desa Wurun	Dinas PU					
		Pembuatan Jembatan penyebrangan sungai paku desa ipu mea	Desa Ipu Mea	Dinas PU					
		- (agar bisa di akses oleh kendaraan Truk)							
		Penataan lingkungan dan pembuatan taman di desa lewu hante	Desa Telang	Dinas Pariwisata					
		- dan tamak mas sota ono di desa telang paju epat							
12	H. Zain Alkim	- Rehab Pustu dan Bantuana Alat Kebidanan	Desa Netampin	Dinas Kesehatan					
		pengaspalan jalan desa netampin dan rehab total/ rehabilitasi berat jembatan warga yang sudah hampir roboh		Dinas PU					
		- pembangunan siring		Dinas PU					
		- perbaikan gereja		Setda					
		- dermaga pemandian	Desa Puri	Dinas PU					
		- pembuatan pagar perkuburan		Dinas Sosial					
		- tambahan ruang belajar		Dinas Pendidikan					

No	Nama	Ringkasan Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Total Usulan	Disetujui	Tidak Disetujui	Total Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		permintaan bantuan dari pengurus rumah ibadah baik - Musholla / gereja	Desa Kupang Bersih	Setda					
		- pengadaan moubeler sekolah yang sudah sangat rusak		Dinas Pendidikan					
13	Roma Analta	Penataan halaman dan pembuatan pagar UPT Diknas - Kecamatan paku	Desa Tampa	Dinas Pendidikan					
		- Pengaspalan Jalan Bendungan Tampa		Dinas PU					
		- Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Desa Lauw Jawuk	Perkim					
		Perehapan Gedung sekolah SDN 4 Tampa dan Rumah Dinas - Guru SDN 4 Tampa		Dinas Pendidikan					
		Pengkatan dan pengaspalan jalan jalan simpang runggu - - runggu raya (1 Km)	Desa Rungu Raya	Dinas PU					
		- pengaspalan jalan tampa - tarinsing (2 Km)	Desa Tampa	Dinas PU					
14	Trisna Andrilawitri, S.Pd	- Pembuatan siring Jalan Dusun Gunung Karasik	Dusun gunung karasik(awang)	Dinas PU					
		- Pembuatan siring Sekolah di SDN Apar Batu	Desa ampar batu (Awang)	Dinas Pendidikan					
		Pembuatan Siring Penangkis banjir / Siring Normalisasi Sungai - didesa Biwan RT I	Kec. Awang	Dinas PU					
		- Peningkatan Jalan Kalamus bantai Napu	Kec. Paku	Dinas PU					
		- Pembuatan siring Penagkis banjir sungai kikis desa kalamus	kec paku	Dinas PU					
15	Depe, SE	- Lanjutan Pembuatan Pagar SDN Dorong	Desa dorong	Dinas Pendidikan					
		- Pembuatan Pagar SDN 3 jaar desa Gumpa	Desa Gumpa	Dinas Pendidikan					
		- Peningkatan Jalan Romen di desa Dorong	Desa dorong	Dinas PU					
		- Peningkatan jalan desa Bentot RT. 07 Gang Buntan	Desa Bentot	Dinas PU					
		- Penataan Halaman SDN Bamban	Desa baban	Dinas Pendidikan					
		- Peningkatan Merpati Desa Dorong RT II	Desa dorong	Dinas PU					
16	Ariantho S. Muler, ST, MM	- Pengaspalan Jalan lanjutan Lebo lampeong	Desa Lebo	Dinas PU					
		- Pembuatan Jalan Beton Jalan Lebo - Ampah, Lebo Lampeong		Dinas PU					
		- Pembangunan Los Pasar Permanen		Dinas PU					
		- Pengaspalan jalan Lingkungan Lebo Jawuk Janah Harapan		Dinas PU					
		Pembangunan Rumah Dinas Permanen SDN Lebo dan - Pembangunan Gedung TK Lebo		Dinas pendidikan					
		Rehab Berat Pustu, WC Pustu Desa dan Pembangunan Polindes - Permanen		Dinas Kesehatan					
		- Pembuatan jalan baru Tarinsing-Bantai Napu 10 Km		DISPERKIM					
		- Perehaban saluran tersier 600 M		Dinas PU					
		- Pengadaan bibit ayam Pertelor dan ayam pedaging		Dinas Peternakan					
		- pembuatan embung		Dinas pu					
		- BPJS bagi warga yang Kurang mampu		Pemerintah Daerah dengan Dinas Sosial					
		- Normalisasi sungai		Dinas PU					
		- Rehabilitasi jalan , Usaha tani balungkan	Ampah kota	Dinas PU					

No	Nama	Ringkasan Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Total Usulan	Disetujui	Tidak Disetujui	Total Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Bantuan bibit ayam petelor (kelompok tani balungakang jaya)	Ampah kota	Dinas PU					
		- Usul bantuan Bibit Ikan	Ampah kota	Dinas Pu					
		- usul pengaspalan jalan irigasi kampung baru Rt. 29 Ampah kota	Ampah kota	Dinas Pu					
		- Rehabilitasi gang Mandiri rt 29 Kampung baru	Ampah kota	Dinas Pu					
		- perbaikan jalan yang sebagian masih rusak disekitar desa turan amis	Desa turan amis	Dinas Pu					
		- usulan pembuatan tong air / tower	daesa turan amis	Dinas Perkim					
		- rehab berat pustu desa turan amis	desa turan amais	Dinas Kesehatan					
17	Rina Nurdirianti, SE	Mengusulkan dibuatkan drainase/ saluran air dari simpang	Desa sarapat	Dinas PU					
		- patai jembatan sarapat							
		tanah di janah munsit yang sudah dihibahkan masyarakat kepada pemerintah barito timur supaya di dioptimalkan penggunaanya, usulan masyarakat desa sarapat agar bisa	Desa rapat	Dinas PU					
		- dibuatkan lapangan sepak bola							
		usulan fasilitasi di polindes marangga berupa tandon air, box bayi dan alat kesehatan lainnya yang menunjang pelayanan di	Desa jaar	Dinas PU					
		- polindes marangga							
		usulan untuk perbaikan jalan desa marangga dan agar bisa	Desa jaar	Dinas PU					
		- dialirkan listrik							
		- usulan bibit padi dadahup 3	Desa jaar	Dinas pertanian					
		pengaspalan jalan masuk sampai depan sekolah Madrasah	Madrasah AL-fitrah Tamiang Layang Jln 45 RT: 15	Diknas					
		- Tsanawiah		Dinas PU					
		- dibuatkan drainase di jalan 45							
18	Adolina Sendol, S.Pd	- Aspal jalan di dalam lingkungan RSUD	RSUD Tamiang layang	Dinas PU					
		- pembuatan pagar samping dan belakang RSUD	RSUD Tamiang layang	Dinas PU					
		penimbunan jalan Padat Harara - Magantis yang rusak parah /	Desa harara Desa mangantis	Dinas PU					
		- terputus							
		Pembangunan baru untuk 2 ruang kelas TK ade irma Suryani	Jalan kartika jaya Tamiang layang	Dinas Pendidikan					
		- (yang lama sudah tidak layak pakai jabuk dan bocor)							
		- drainase jalan padat di Harara - Magantis	Desa hara desa mangantis	Dinas PU					
		Tangga baru di depan Pasar sayur dan ikan agar pedagang bisa							
		- naik ke atas	Pasar Tamiang Layang	Dinas PU					
19	Nur Sulistio, S.Pd	- aspal jalan Puri - Sibung	Desa Puri Sibung	Dinas PU					
		- aspal Rt 2 Batuah	Raren Batuah	Dinas PU					
		- aspal rt 04 - rt 09 sibung	Desa sibung	Dinas PU					
		- tiang listrik sibung	Desa sibung	PLN					
		- tiang listrik tangkum	Des tangkum	PLN					
		- aspal desa tangkum	Desa tangkum	Dinas PU					
		- pelebaran lapangan bola sibung	Desa sibung	Dinas PU					
		- aspal desa turan amis	Desa turan amis	Dinas PU					
		- peningkatan ruas jalan malintut - turan amis	Desa turan amis	Dinas PU					
		- pengerasan jalan desa puri (Pertanian)	Desa puri	Dinas PU					
		- Pagar SDN Tangkum	Desa tangkum	Dinas Pendidikan					

No	Nama	Ringkasan Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Total Usulan	Disetujui	Tidak Disetujui	Total Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Pagar Mesjid Sibung	Desa sibung	Setda					
		- Aspal Desa Wakatitir - talohen	Desa wakatitir	Dinas PU					
		- rehab jembatan trimo desa sibung	Desa sibung	Dinas PU					
		- cetak lahan darat untuk pertanian palawija raren batuah	Raren Batuah	Dinas pertanian					
20	H. Cilikman Jakri, S.Pd, M.Pd	Jembatan Beton Sungai Tangkiling untuk menghubungkan empat desa, Desa tuyau, desa Kupang Bersih, desa Ketab dan	Desa tuyau, Kupang Bersih, Ketab dan Pinang	Dinas PU					
		- Pinang tunggal	tunggal						
		- Jalan Muhajirin desa Tuyau	Desa Tuyai	Dinas PU					
		- jalan Ampah Indah Ampah Kota	Ampah kota	Dinas PU					
		Jalan Jembatan Barurintis menembus jalan Samsat dengan	Tamiang layang	Dinas PU					
		- jalan Gotong Royong							
		- Jalan Usaha tani Desa puri Sepanjang 700 M	Desa Puri	Dinas PU					
21	Wahyudinoor, SP, MM	Pembangunan jalan di rt 20 dan Rt. 19 berada di jalan talohen	Ampah kota	Dinas PU					
		- ampah kota							
		Memperbaiki saluran irigasi putai yang berada di RT 20 Ampah	Ampah kota	Dinas PU					
		- Kota							
		- Pembelian Hand Traktor dan Perontok Perontok Padi	Ampah kota	Dinas pertanian					
		- Perbaikan jalan tani masyarakat Tumpung Ulung	Desa Tumpung Ulung	Dinas PU					
		Penimbunan Halaman SDN dan Perbaikan Meubeler di SDN	Desa Bararawa	Dinas Pendidikan					
		- Bararawa							
22	Raran, A.Md	Masalah inprastruktur dari Masyarakat Desa bantai Napu Ke desa Kalamus Agar pemerintah daerah memperhatikan masalah	Desa Bantai Napu Kalamus	Dinas PU					
		- jembatan							
		Masyarakat Putut tawuluh Mengajukan lanjutan jalan dari desa	Desa Putut Tawuluh Lagan	Dinas PU					
		- putut tawuluh ke Dusun Lagan							
		Masyarakat Menghendaki dari Pihak Pemerintah daerah	Desa Belawa Epung Wawei	Dinas PU					
		- Melanjutkan jalan Desa belawa ke dusun Epung Wawei							
		masyarakat Memohon Kepada pemerintah daerah untuk	Desa Belawa Pruwian	PLN					
		- pemasangan listrik dari RT. 03 desa Belawa Samapi di Pruwian							
		Kepala desa Putut Tawuluh Mengajukan Agar ada lanjutan	Desa Putut Tawuluh Rungu	Dinas PU					
		- Jalan Putut tawuluh ke Dusun Rungu Raya.	Raya						
23	Drs. Asmadi Ranji	- Mohon Rehab/Perbaikan Sumur di Rt. 02	Desa Matarah	Dinas PU					
		- Mohon Perbaikan Jalan di Rt 04		Dinas PU					
		- mohon pengadaan kolam ikan		Dinas Perikanan					
		- mohon pebaiakan Bendungan		Dinas PU					
		- Mohon bantuan / pengadaan Sumur		Dinas PU					
		- Mohon Pengadaan lapangan Badminton		Dinas PU					
		- mohon penambahan ukuran lapangan Volly		Dinas PU					
		- masalah pembakaran lahan		Setda					
		- mohon bantuan sawah		Dinas Pertanian					
		- mohon agar bendungan bisa terealisasi tahun 2020		Dinas PU					

[illegible]

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

BAB VII

PENUTUP

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Substansi RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan antar SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Barito Timur, aparat Pemerintah Kabupaten serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Barito Timur, dalam merumuskan berbagai kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan sosial kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2021, untuk menjadikan daerah Kabupaten Barito Timur menjadi aman, maju dan mandiri dengan masyarakat yang makmur dan sejahtera, sebagaimana mottonya “ ***Gumi Jari Janang Kalalawah*** “.

TABEL 4.1. STRUKTUR RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	PLAFON ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	APBD 2020	PROYEKSI APBD 2021		
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88.437.482.415,00	91.008.367.915,00	2.570.885.500,00	2,91%
Pajak Daerah	34.508.300.000,00	40.428.150.000,00	5.919.850.000,00	17,15%
Retribusi Daerah	9.922.410.000,00	13.560.445.500,00	3.638.035.500,00	36,66%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.629.483.615,00	8.629.483.615,00	-	0,00%
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.377.288.800,00	28.390.288.800,00	(6.987.000.000,00)	-19,75%
PENDAPATAN TRANSFER	760.721.936.945,00	835.413.650.204,00	74.691.713.259,00	9,82%
Transfer Pemerintah Pusat	732.792.812.000,00	806.163.069.011,00	73.370.257.011,00	10,01%
Transfer Antar Daerah	27.929.124.945,00	29.250.581.193,00	1.321.456.248,00	4,73%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.429.629.000,00	98.063.164.000,00	(3.366.465.000,00)	-3,32%
Hibah	14.122.500.000,00	14.122.500.000,00	-	
Pendapatan Lainnya	87.307.129.000,00	83.940.664.000,00	(3.366.465.000,00)	-3,86%
Jumlah Pendapatan	950.589.048.360,00	1.024.485.182.119,00	73.896.133.759,00	7,77%
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	670.137.894.691,00	711.432.321.340,00	41.294.426.649,00	6,16%
Belanja Pegawai	448.514.558.513,00	498.334.691.860,00	49.820.133.347,00	11,11%
Belanja Barang dan Jasa	203.200.436.178,00	184.997.629.480,00	(18.202.806.698,00)	-8,96%
Belanja Bunga	-			
Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	-	
Belanja Hibah	15.322.900.000,00	25.000.000.000,00	9.677.100.000,00	63,15%
Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	0,00%
BELANJA MODAL	134.630.306.129,00	174.292.709.040,00	39.662.402.911,00	29,46%
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	
BELANJA TRANSFER	166.923.935.600,00	162.021.405.629,00	(4.902.529.971,00)	-2,94%
Jumlah Belanja Daerah	973.692.136.420,00	1.049.746.436.009,00	76.054.299.589,00	7,81%
Surplus / (Defisit)	(23.103.088.060,00)	(25.261.253.890,00)	(2.158.165.830,00)	9,34%
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	33.103.088.060,00	40.261.253.890,00	7.158.165.830,00	21,62%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Anggaran Sebelumnya (SILPA)	33.103.088.060,00	40.261.253.890,00	7.158.165.830,00	21,62%
Pencairan Dana Cadangan	-	-		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		
Penerimaan Piutang Daerah	-	-		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	33.103.088.060,00	40.261.253.890,00	7.158.165.830,00	21,62%
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00%
Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00%
Pembayaran Pokok Utang	-	-		
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00%
Pembiayaan Neto	23.103.088.060,00	25.261.253.890,00	2.158.165.830,00	9,34%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

URAIAN	PLAFON ANGGARAN			%
	APBD 2015	APBD 2016		
PENDAPATAN DAERAH	950.589.048.360,00	1.024.485.182.119,00		#REF!
Pendapatan Asli Daerah	88.437.482.415,00	91.008.367.915,00		#REF!
Dana Perimbangan	760.721.936.945,00	835.413.650.204,00		#REF!

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	101.429.629.000,00	98.063.164.000,00	#REF!
BELANJA DAERAH	#REF!	#REF!	#REF!
Belanja Tidak Langsung (BTL)	#REF!	#REF!	#REF!
Belanja Langsung (BL)	#REF!	#REF!	#REF!
SURPLUS / (DEFISIT)	#REF!	#REF!	#REF!
PEMBIAYAAN DAERAH	23.103.088.060,00	25.261.253.890,00	#REF!
Penerimaan Pembiayaan	33.103.088.060,00	40.261.253.890,00	#REF!
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	#REF!
Pembiayaan Neto	23.103.088.060,00	25.261.253.890,00	#REF!
SILPA (TA Berkenaan)	#REF!	#REF!	

1.030.000.000.000,00
56.307.863.580,00

46.207.090.092,01

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

